



Pakistan



India

MONOGRAF

KEBIJAKAN PERTAHANAN INDIA

Responsif & Provokatif di Mandala Asia Selatan

NOVA BELA DHYTA
IWAN SULISTYO

MONOGRAF

**KEBIJAKAN
PERTAHANAN INDIA**

Responsif & Provokatif di Mandala Asia Selatan

Nova Bela Dhyta & Iwan Sulistyono



2024

Kebijakan Pertahanan India ©Nova Bela Dhyta & Iwan Sulistyo

Editor: Arie Fitria

Desain sampul: Pingki Novita Berliana

Tata letak: Pingki Novita Berliana

i+74 hlm, 14 x 20 cm ISBN 978-623-10-4103-6

Diterbitkan oleh **Hexagon Publishing** Cetakan 1, September 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh tanpa izin penerbit.

Distributor:

Hexagon Publishing

Jl. Karet No.95 Kemiling, Bandar Lampung admin@hexagonpublishing.id

KATA PENGANTAR

Monograf ini sebelumnya merupakan skripsi yang ditulis dalam kurun waktu tahun 2018 hingga awal 2019 pada Jurusan Hubungan Internasional (HI), FISIP Universitas Lampung. Sekitar enam tahun berlalu setelah skripsi tersebut rampung dan ia hanya tersimpan pada online repository kampus, maka tercetuslah gagasan untuk menerbitkannya dalam bentuk monograf.

Tujuan penerbitan ini ialah agar suatu karya sederhana dapat berkontribusi bagi studi tentang dinamika politik-keamanan di Asia Selatan, khususnya relasi India-Pakistan, yang hingga kini tampak sangat dinamis. Penulis meyakini bahwa kedua negara kunci di Asia Selatan ini akan selalu diperhitungkan secara geografis, geopolitis, geostrategis, dan geoekonomis oleh para pemain kunci di level global dan regional lain.

Sudah pasti banyak terdapat kekurangan di dalam karya sederhana ini. Sebagai suatu karya akademis, argumen di dalam naskah ini tentu dapat dibantah oleh argumen penulis/ilmuwan lain dengan perspektif yang berbeda.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Hexagon yang memungkinkan monograf ini sampai di tangan para pembaca.

Bandarlampung dan Jambi, September 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iv
DAFTAR TABEL, GRAFIK, & GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB 1 - ASIA SELATAN YANG SANGAT DINAMIS	1
1.1. Peran Sentral India di Asia Selatan	1
1.2. Tahun 2014–2017: Pemberontakan, Kerusuhan, & Konflik Perebutan Wilayah Perbatasan Antarnegara di Kawasan	7
BAB 2 - SEJUMLAH MATA RANTAI: PERSEPSI DIRI, LINGKUNGAN GEOSTRATEGIS, STRATEGI KEAMANAN, ASEAN, & KEKUATAN MILITER BARU	9
2.1. Dari Persepsi hingga Kekuatan Militer Baru	9
2.2. Kerangka Analitis	18
2.2.1. Kebijakan Pertahanan (<i>Defence Policy</i>)	18
2.2.2. Lingkungan Strategis (<i>Strategic Environment</i>)	19
2.2.3. Dinamika Persenjataan (<i>Arms Dynamic</i>)	19
2.2.3.1. Model Aksi-Reaksi (<i>Action-Reaction Model</i>)	20
2.2.3.2. Model Struktur Domestik (<i>The Domestic Structure Model</i>)	21
2.2.3.3. Model Teknologi Imperatif (<i>The Technological Imperative</i>)	21
2.2.4. Kepentingan Nasional (<i>National Interest</i>)	21
2.2.5. Penggantaran (<i>Deterrence</i>)	22
2.2.6. Perimbangan Kekuatan (<i>Balance of Power</i>)	22
2.2.7. Dilema Keamanan (<i>Security Dilemma</i>)	22
BAB 3 - INDIA YANG RESPONSIF & PROVOKATIF DI MANDALA ASIA SELATAN	24
3.1. Sekilas tentang India	24
3.2. Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Selatan, 2014–2017	31
3.3. Kebijakan Pertahanan India: Respons terhadap Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Selatan, 2014–2017.....	38
3.3.1. Kebijakan India dalam Upaya Meningkatkan Postur Pertahanan	42

3.4. Perbandingan Postur Pertahanan Negara-negara Asia Selatan, 2014–2017	51
3.4.1. Jumlah Persenjataan.....	51
3.4.2. Jumlah Persenjataan	52
3.4.2.1. Angkatan Darat	52
3.4.2.2. Angkatan Laut	53
3.4.2.3. Angkatan Udara	54
3.4.2.4. Senjata Nuklir	54
BAB 4 - KESIMPULAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	66
Tentang Penulis	71

RINGKASAN

Monograf ini menyajikan telaah tentang kebijakan pertahanan India dalam merespons dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Selatan selama periode tahun 2014–2017. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kasus, data yang digunakan dalam buku ini merupakan jenis data sekunder yang utamanya dipublikasi oleh *the International Institute for Strategic Studies (IISS)* dan *the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, termasuk pula data dari Kementerian Pertahanan India, yakni *Joint Doctrine for the Indian Armed Forces (JDIAF)*. Secara spesifik, data yang digunakan ialah data berbagai kebijakan India terkait penambahan jumlah dan kualitas peralatan militer, jumlah anggaran belanja pertahanan, jumlah serta penambahan kepemilikan senjata konvensional dan senjata nuklir, jumlah pasukan dan jenis armada tempur, serta angka Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Monograf menggunakan beberapa konsep, yakni *defense policy*, *strategic environment*, *national interest*, *deterrence*, *balance of power*, *security dilemma*, dan *arms dynamic* dengan tiga model yaitu *action-reaction*, *domestic structure*, dan *technological imperative*. Argumen yang ditawarkan di dalam bacaan ini ialah bahwa seluruh negara, khususnya India, telah meningkatkan kapabilitas pertahanan/militer mereka dari segi kuantitas, seperti menambah jumlah personel dan melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan pada tiap matra (darat, laut, dan udara), termasuk pula pada hulu ledak nuklirnya sebagai wujud *deterrence*. India merupakan negara yang lebih bersifat responsif dan cenderung provokatif. Spiral aksi-reaksi lebih melibatkan India dan Pakistan. Dari segi jumlah persenjataan konvensional, India adalah yang paling kuat; tetapi, dari aspek kuantitas hulu ledak nuklir, relatif lebih sedikit dibanding kompetitor utamanya, Pakistan. Sikap responsif yang ditunjukkan oleh India didasari oleh persepsi ancaman, dilema keamanan, dan kepentingan nasionalnya, berupa faktor geografis, demografis, dan ekonomis. Kerja sama militer strategis yang dilakukan oleh India dengan berbagai negara, khususnya Amerika Serikat, merupakan reaksi atas hubungan Pakistan dan Tiongkok.

DAFTAR TABEL, GRAFIK, & GAMBAR

Tabel 1. Konflik Internal di Kawasan Asia Selatan	4
Tabel 2. Sejumlah Studi terkait India.....	16
Tabel 3. Estimasi Cadangan Batubara di India Tahun 2017.....	27
Tabel 4. Estimasi Cadangan Lignit di India Tahun 2017	28
TABEL 5. Estimasi Cadangan Minyak Bumi dan Gas Alam	29
Tabel 6. Belanja Pertahanan Negara-negara di Asia Selatan (US\$ miliar)	33
Tabel 7. Luas Wilayah, Populasi Penduduk, dan GDP Negara-negara di Asia Selatan Tahun 2017	43
Tabel 8. Upaya India dalam Peningkatan Kapabilitas Pertahanan Tahun 2014–2017.....	47
Tabel 9. Perimbangan Pasukan Bersenjata Negara-negara Asia Selatan Tahun 2017	51
Tabel 10. Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Darat Negara-negara di Asia Selatan Tahun 2017	52
Tabel 11. Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Laut Negara-negara di Asia Selatan Tahun 2017	53
Tabel 12. Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Udara Negara-negara di Asia Selatan Tahun 2017	54
Tabel 13. Perimbangan Kekuatan Nuklir Negara-negara di Asia Selatan Tahun 2014–2018	55
GRAFIK 1. BELANJA PERTAHANAN NEGARA-NEGARA DI ASIA SELATAN TAHUN 2017 (US\$ MILIAR) ...	56
GRAFIK 2. BELANJA PERTAHANAN NEGARA-NEGARA DI ASIA SELATAN (MENURUT PERSENTASE TERHADAP GDP)	58

DAFTAR SINGKATAN

ACV	: <i>Air Cushion Vehicle</i>	MoD	: <i>Ministry of Defense</i>
AIFV	: <i>Armored Infantry Fighting Vehicle</i>	NAM	: <i>Non-Aligned Movement</i>
APC	: <i>Armored Personnel Carrier</i>	NIDS	: <i>National Institute for Defense Studies</i>
AS	: <i>Amerika Serikat</i>	ORF	: <i>Observer Research Foundation</i>
ASEAN	: <i>the Association of Southeast Asian Nations</i>	PBB	: <i>Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
CSD	: <i>Cold Start Doctrine</i>	PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
EASO	: <i>the European Asylum Support Office</i>	PD	: <i>Perang Dingin</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>	PD II	: <i>Perang Dunia II</i>
GERD	: <i>Gross Expenditure on Research and Development</i>	Recce	: <i>Reconnaissance</i>
IGCAR	: <i>Indira Gandhi Centre for Atomic Research</i>	RRMP	: <i>Ratthalli Rare Materials Plant</i>
IISS	: <i>the International Institute for Strategic Studies</i>	R&D	: <i>Research and Development</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>	SASSI	: <i>South Asian Strategic Stability Institute</i>
ISPR	: <i>Inter-Services Public Relations</i>	SIPRI	: <i>Stockholm International Peace Research Institute</i>
JDIAF	: <i>Joint Doctrine for the Indian Armed Forces</i>	SRPIF	: <i>Strategy Research Project International Fellow</i>
LT	: <i>Light Tank</i>	WEC	: <i>World Energy Council</i>
MBT	: <i>Main Battle Tank</i>	WTO	: <i>the World Trade Organization</i>
MDA	: <i>Maritime Domain Awareness</i>	ZEE	: <i>Zona Ekonomi Eksklusif</i>

MONOGRAF

ASIA SELATAN YANG SANGAT DINAMIS

B A B

01

ASIA SELATAN YANG SANGAT DINAMIS

Bab ini menyajikan uraian tentang betapa sangat dinamisnya Asia Selatan yang dibagi menjadi dua bagian. Setelah pada bagian pertama dijabarkan peran sentral India di kawasan, bagian kedua mengemukakan hal krusial apa saja yang terjadi dalam kurun waktu 2014 hingga 2017. Pada bagian ini akan ditunjukkan bahwa Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang menarik untuk dikaji aspek keamanannya. Pada kawasan yang dihuni oleh delapan negara ini banyak terjadi konflik internal kawasan. Sebagian besar konflik yang terjadi di kawasan ini adalah konflik teritorial atau sengketa wilayah. Perbedaan ideologi dan budaya juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik kawasan. India merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang terpantau selalu meningkatkan anggaran belanja pertahanannya dari tahun ke tahun.

Konflik yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya di kawasan ini tentu berdampak pada stabilitas keamanan kawasan secara keseluruhan. Stabilitas keamanan dan dinamika lingkungan strategis sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertahanan, ekonomi, sosial, dan politik. Faktor-faktor tersebut pasti selalu hadir dalam hubungan antarnegara-negara di kawasan.

1.1. Peran Sentral India di Asia Selatan

Perang Dunia (PD) II menyisakan dua kekuatan besar yang kembali bersaing memperebutkan posisi serta pengaruh tertinggi pada level internasional. Dengan dominasi kekuatan militernya, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet menjadi dua negara superpower yang mampu bertahan melewati PDII dan kemudian membawa dinamika hubungan internasional masuk ke dalam periode Perang Dingin (PD). Awalnya, setelah memperoleh kemenangan atas Jerman, Jepang, dan Italia, kedua negara adikuasa tersebut bukanlah merupakan dua kekuatan yang bersaing. Namun, perbedaan ideologi di antara keduanya kemudian justru menyulut perselisihan pandangan dan sikap yang berujung pada formasi persaingan aliansi militer AS dan Uni Soviet. Dengan sistem yang bersifat bipolar, PD mampu menjaga stabilitas keamanan internasional, bebas dari perang besar abad ke-20. Terhentinya persaingan dan perselisihan AS-Uni Soviet ini ditandai pula dengan berakhirnya arms race (perlombaan senjata) di antara keduanya.¹

¹ Andrew Heywood, *Global Politics* (New York: Palgrave Macmillan), 2011, 217.

Pada tahun 1990, setelah Uni Soviet lebih memprioritaskan pembangunannya pada bidang perekonomian dalam negeri dibandingkan tetap meningkatkan kekuatan militer, AS pada akhirnya menjadi satu-satunya negara adikuasa di dunia. Kondisi demikian pun menandai babak baru dalam dinamika hubungan internasional. AS semakin menyebarkan pengaruhnya ke seluruh wilayah di dunia. Dengan ideologi liberal-demokrasinya, AS menjalin kerja sama dengan negara-negara yang dianggap berpotensi dalam mempertahankan kedudukannya sebagai negara adikuasa.²

Salah satu kawasan yang dianggap cukup dinamis dalam konteks keamanan ialah Asia Selatan. Ia menjadi sasaran bagi AS untuk melakukan ekspansi power serta penyebaran ideologi. Asia Selatan merupakan kawasan yang terdiri dari delapan negara; sesuai urutan abjad yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Asia Selatan sendiri juga dikenal sebagai kawasan yang menyimpan berbagai konflik yang didasari oleh perbedaan ideologi dan perebutan wilayah. Selain itu, negara-negara di Asia Selatan pun terlibat di dalam perlombaan senjata, baik senjata konvensional maupun nuklir. Perlombaan senjata sendiri dapat diukur melalui penilaian terhadap kepemilikan dan pengembangan nuklir dari pihak yang terlibat. Pada konteks kawasan Asia Selatan, dua negara yang menggunakan nuklir sebagai bentuk pertahanan-keamanannya ialah India dan Pakistan. Melakukan uji coba nuklir sejak tahun 1998, perilaku kedua negara ini dapat dikatakan sebagai bentuk aksi-reaksi, dimana ketika India menunjukkan power-nya, Pakistan pun akan bersikap serupa.³

Salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang memainkan peran penting dan krusial, utamanya dari segi militer, geografis, dan demografis, ialah India. Sebagai negara yang paling tinggi power-nya bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Selatan, India dianggap memiliki 'pengaruh'. Terlebih, di Asia Selatan juga tersimpan cukup banyak konflik antarnegara yang, bila dilihat dari perspektif realisme, tentu berpotensi menjadi pemicu ketegangan dan bahkan perang di tingkat kawasan. Jika dilihat dari konflik yang terjadi di kawasan Asia Selatan, India tampak banyak memainkan peran sebagai negara yang 'mendominasi' (Tabel 1 menyajikan beberapa konflik antarnegara di kawasan Asia Selatan yang melibatkan India).

Pemilihan India sebagai fokus sorotan didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Menurut Hans J. Morgenthau, seorang pemikir realis yang sangat terkemuka di dalam ilmu Hubungan Internasional, power suatu negara ditentukan melalui delapan elemen, yaitu

² *Ibid.*

³ Toby Dalton and Jaclyn Tandler, *Understanding the Arms Race in South Asia* (Washington: Carnegie), 2012, 11.

geografis, sumber daya alam, kapasitas industri, kesiapan militer, populasi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi.⁴ Di dalam kajian ini, penulis menggunakan empat dari delapan elemen tersebut untuk menentukan/mengukur power yang dimiliki oleh India, yakni: kesiapan militer, geografis, populasi, dan kapasitas industri.

Pertama, dalam konteks militer, India merupakan salah satu negara dengan kekuatan nuklir di dunia, yaitu sekitar 130-140 hulu ledak.⁵ **Kedua**, dari aspek geografis, India adalah negara terluas di Asia Selatan dengan luas wilayah sekitar 3,2 juta km persegi.⁶ **Ketiga**, jika diperhatikan melalui dimensi jumlah penduduk, India adalah negara pada urutan nomor dua terbesar di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok, yakni dengan jumlah total populasi sebesar 1,2 miliar jiwa.⁷ **Keempat**, sejak tahun 2014, India mengalami peningkatan sebesar 5% dalam hal perekonomian yang ditandai dengan kenaikan daya saing ekspor dan jumlah investasi. Kegiatan investasi India semakin kuat dengan peningkatan 7,3% pada tahun 2015. Pada tahun 2016, permintaan domestik dan investasi asing menopang perekonomian India tetap meningkat sebesar 7,6%. Kemudian pada tahun 2017, peningkatan perekonomian India hanya sebesar 6,7%. Alhasil, pada tahun 2018, India berencana terus meningkatkan dimensi ekonominya sebesar 7,4%.⁸

⁴ Lihat selengkapnya Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations* (New York: Alfred A Knopf, 1948).

⁵ Lihat lebih jauh SIPRI, *SIPRI Year Book 2018* (Stockholm: SIPRI, 2018)

⁶ Lihat secara lengkap *The World Bank, Land Area Data 2018*.

⁷ Lihat secara utuh IISS, *the Military Balance 2018* (London: IISS, 2018).

⁸ Lihat secara rinci IISS, *the Military Balance 2018* (London: IISS, 2018).

Tabel 1. Konflik Internal di Kawasan Asia Selatan

No.	Aktor	Nama Konflik	Latar Belakang	Penyelesaian
1.	India dan Bhutan	Kedaulatan Bhutan	India menjalin kerja sama dalam bentuk perjanjian India-Bhutan Friendship Treaty 1949. Namun, Bhutan menganggap perjanjian tersebut memberatkan Bhutan dalam bertindak mencapai kepentingan nasional negaranya, sehingga terjadi perselisihan antara India dan Bhutan selama puluhan tahun.	Pada akhirnya, diadakan revisi atas perjanjian tahun 1949 pada tahun 2007. Selanjutnya, perjanjian ini lebih menekankan pada kepemilikan wilayah teritorial, sehingga masing-masing pihak tidak diperkenankan menggunakan wilayah teritorial untuk melakukan kegiatan yang mengancam keamanan nasional masing-masing.
2.	Bangladesh dan Pakistan	Perang Kemerdekaan Bangladesh	Perang antara Pakistan Timur (Bangladesh) dan Pakistan Barat (Pakistan). Bangladesh diserang oleh pasukan militer Pakistan dan menelan ratusan korban. India memberi dukungan pada Bangladesh, dengan jaminan dari Uni Soviet. Sedangkan Pakistan mendapatkan dukungan dari AS.	Bangladesh berhasil meraih kemerdekaannya dengan bantuan dari India dan Uni Soviet. Setelah menjadi negara yang berdaulat pada tahun 1971, Bangladesh pun berusaha kembali membangun stabilitas ekonomi dan politik negaranya yang lemah akibat perang.
3.	India dan Bangladesh	Konflik sungai Gangga (Sengketa Barrage Farakka)	Sungai berada diperbatasan kedua negara dan menjadi sumber air kedua negara. Konflik bermula saat India secara sepihak	Perjanjian atas alokasi air sungai Gangga, tahun 1975 hanya berlaku hingga tahun 1977 karena pelanggaran sepihak

No.	Aktor	Nama Konflik	Latar Belakang	Penyelesaian
			membangun bendungan Farakka melintasi sungai Gangga di perbatasan Bangladesh. Kemudian dibuat perjanjian berbagi sumber air, tetapi India melanggar perjanjian tersebut. Itu menyebabkan kerugian berupa kekeringan serta banjir bagi Bangladesh.	yang dilakukan oleh India. Maka, kemudian diadakan pembaruan perjanjian tersebut pada tahun 1984 dan 1996 meskipun perjanjian tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik yang terjadi diantara keduanya.
4.	India dan Pakistan	Konflik Kashmir	Perebutan wilayah Kashmir didasari oleh kepentingan masing-masing negara atas potensi yang dimiliki oleh Kashmir. Kashmir dikenal dengan tanah yang subur dan kaya akan nilai historis. Selain itu, akar dari permasalahan ini juga adalah perbedaan agama dan ideologi antara kedua negara. Konflik ini terjadi sekitar tahun 1947 setelah kemerdekaan kedua negara hingga tahun 1965. Puncak ketegangan antara keduanya adalah pada tahun 1998, saat India maupun Pakistan melakukan uji coba senjata nuklir.	India dan Pakistan mengembangkan nuklir untuk bersaing menjadi negara yang paling kuat di kawasan Asia Selatan dan memiliki wilayah Kashmir. Untuk mencapai kepentingannya masing-masing, negara menjalin kerja sama dengan negara di luar kawasan Asia Selatan.

No.	Aktor	Nama Konflik	Latar Belakang	Penyelesaian
5.	India dan Nepal	Perselisihan kebijakan politik	India memegang kendali atas kebijakan luar negeri Nepal. Alhasil, selama bertahun-tahun, Nepal berada di bawah tekanan India. Kebijakan yang dikeluarkan oleh India dinilai tidak sesuai dengan kondisi Nepal saat itu.	Nepal memanfaatkan kondisi politik dimana India berkonflik dengan negara lain di luar kawasan Asia Selatan, yaitu Cina, pada tahun 1962.

Sumber: Data mengenai konflik internal di kawasan Asia Selatan ini dihimpun melalui berbagai sumber antara lain: Arif Husain Malik and Nazir Ahmad Sheikh, 2016, "Changging Dynamics of Indo-Bhutan Relations: Implication for India". International Journal of Political Science and Development. Vol. 4 No. 2. 44; Drong Andrio, 2016, "India's Role in the Emergence of Bangladesh as an Independent State". Vestik RUDN International Relation. Vol. 16 No. 2. 736.; Keith W. Hipel, Maiko S, Yoshimi H, Third Party Intervention in Conclit Resolution: Dispute between Bangladesh and India over Control of the Ganges River (Japan: Springer Japan), 2016, 331.; Swaptik Chowdhury, 2016, "Factors Affecting India-Pakistan Conflict and the Path Ahead". Foreign Policy Reasearch Centre Journal. Vol. 4. 97; serta Pashupati Shumsere J. B. Rana, 1971, "India and Nepal: The Political Economy of a Relationship". University of California Press. Vol. 11 No. 7. 659.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa India merupakan negara yang cenderung mengambil peran/bagian di dalam setiap hubungan antarnegara di kawasan Asia Selatan. India juga berupaya memperkuat kapabilitas militernya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 hingga 2013, India mampu mempertahankan posisinya sebagai negara dengan kapabilitas pertahanan terbesar kesembilan pada level internasional. Kemudian pada tahun 2014, India menduduki posisi kedelapan dalam hal pertahanan negara. Peningkatan kapabilitas militer India semakin tampak, sehingga ia mampu menjadi negara dengan kapabilitas militer terkuat keenam pada tahun 2015⁹ dan 2016¹⁰.

⁹ The International Institute for Strategic Studies (IISS), *The Military Balance 2016* (London: IISS), 2016. 19.

¹⁰ The International Institute for Strategic Studies (IISS), *The Military Balance 2017* (London: IISS), 2017. 19.

Dalam kurun waktu satu tahun, India kembali menunjukkan peningkatan power-nya dengan menjadi negara dengan kapabilitas militer terbesar kelima di level internasional pada tahun 2017.¹¹ Setiap tindakan yang dilakukan oleh India tentu akan selalu memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan pertahanan yang dimilikinya. Maka, dapat dikatakan bahwa hubungan antara India dengan negara lainnya di Asia Selatan terkait erat dengan kebijakan pertahanan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap India dalam melakukan peningkatan kapabilitas militernya itu dipengaruhi oleh faktor eksternal negaranya. India mengambil langkah tersebut untuk menjaga keamanan negaranya karena beranggapan bahwa terdapat potensi ancaman yang akan mengganggu stabilitas keamanan domestik. Oleh karena itu, monograf ini menelaah bagaimana dinamika keamanan wilayah eksternal India dengan batasan kawasan Asia Selatan. Kemudian dianalisis bagaimana India, melalui kebijakan pertahanannya, merespons hal tersebut.


1.2. Tahun 2014–2017: Pemberontakan, Kerusuhan, & Konflik Perebutan Wilayah Perbatasan Antarnegara di Kawasan

Negara-negara di sekitar India menjadi faktor penting dalam pengembangan kepentingan nasional India. Posisi negara-negara ini yang berbatasan langsung dengan India juga merupakan bagian krusial bagi keamanan India, terlebih di kawasan Asia Selatan terdapat cukup banyak sengketa teritorial. Semua negara yang ada di Asia Selatan tersebut tentu selalu melakukan penguatan kapabilitas militer guna melindungi kepentingan nasional mereka. Oleh karena itu, idealnya, hal yang perlu dikembangkan oleh India ialah kebijakan pertahanan yang mampu mengimbangi kekuatan-kekuatan tersebut. Maka, monograf ini hendak menjawab satu pertanyaan, yaitu: Bagaimana kebijakan pertahanan India dalam merespons dinamika lingkungan strategis di Asia Selatan dalam kurun waktu 2014–2017?

Penulis menggunakan jangka waktu dari tahun 2014 hingga 2017 agar monograf ini mampu menggambarkan keadaan terkini dari hubungan antara India dan kawasan Asia Selatan. Secara umum, pada pertengahan 2014, India mulai bangkit dari depresiasi rupee yang melanda negaranya. Kemudian, sejak 2015 hingga 2017, kondisi sektor ekonomi dan keamanan India semakin membaik.¹² Selain itu, India juga menjadi salah satu dari lima negara yang aktif

¹¹ *The International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2018* (London: IISS), 2018. 19.

¹² Lihat selengkapnya IISS, *the Military Balance 2015* (London: IISS, 2015).



terlibat dalam perang persenjataan hingga tahun 2017.¹³ Sedangkan, secara khusus, alasan penulis dalam menentukan batasan tahun sorotan 2014–2017 ini adalah karena dua hal, yaitu: **Pertama**, akan ditampilkan pada Tabel 2 bahwa, hingga saat riset ini dilakukan pada tahun 2018, belum terdapat kajian mengenai lingkungan strategis dan kebijakan pertahanan dalam kurun waktu tersebut. **Kedua**, berdasarkan kajian literatur yang penulis lakukan, tahun 2014 sampai dengan 2017 merupakan waktu dimana banyak terjadi pemberontakan, kerusuhan, dan konflik perebutan wilayah perbatasan antarnegara di kawasan Asia Selatan yang itu semua adalah ancaman potensial bagi India sebagai negara yang memiliki 'pengaruh' di dalam kawasan.

¹³ Lihat selengkapnya SIPRI, *SIPRI Year Book 2018* (Stockholm: SIPRI, 2018).

MONOGRAF

**SEJUMLAH MATA RANTAI:
PERSEPSI DIRI, LINGKUNGAN
GEOSTRATEGIS, STRATEGI
KEAMANAN, ASEAN, &
KEKUATAN MILITER BARU**

B A B

02

SEJUMLAH MATA RANTAI: PERSEPSI DIRI, LINGKUNGAN GEOSTRATEGIS, STRATEGI KEAMANAN, ASEAN, & KEKUATAN MILITER BARU

2.1. Dari Persepsi hingga Kekuatan Militer Baru

Untuk mendukung pemahaman, dilakukan tinjauan terhadap beberapa studi/pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan serta dinamika lingkungan strategis di Asia Selatan.

Studi pertama merupakan sebuah jurnal berjudul *“the Reluctant Hegemon: India’s self- perception and the South Asian Strategic Environment”* yang ditulis oleh Subrata K. Mitra, seorang Kepala Departemen Ilmu Politik dan Profesor Riset pada the Institute of South Asia Studies, Heidelberg University, Jerman, pada tahun 2003. Mitra menelaah dilema yang dihadapi India, yaitu antara penegasan hegemoninya di Asia Selatan dan orientasi strategisnya yang tidak mau menghadapi tantangan dan peluang dalam dinamika keamanan di Asia Selatan.¹⁴ Menganalisis secara empiris, Mitra berfokus pada perhitungan sumber daya ekonomi dan militer India berdasarkan indikator kepemilikan senjata konvensional. Selain itu, analisisnya juga dilengkapi dengan faktor politis dan institusional yang signifikan untuk menghitung power dari suatu negara.

Menggabungkan aspek materil dan simbolik dari kebijakan India dalam konsep security doctrine¹⁵, Mitra membagi pembahasannya di dalam jurnal tersebut menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama, ia memaparkan peringkat India berdasarkan sumber daya strategisnya. Kemudian pada bagian kedua, ia mengulas doktrin strategis India dan organisasi keamanan. Selanjutnya, prediksi tantangan yang akan dihadapi India di masa depan diuraikannya pada bagian ketiga. Setelah memb erikan pemaparan mengenai ketiga bagian pembahasan tersebut, Mitra kemudian menyimpulkan bahwa India dikenal sebagai negara yang paling kuat di kawasan Asia Selatan. Namun, pandangan dari Mitra tersebut bukan disebabkan oleh kepemilikan nuklir India

¹⁴ Subrata K. Mitra, 2003, *“The Reluctant Hegemon: India’s self-perception and the South Asian Strategic Environment”*. Carfax Publishing. 400.

¹⁵ *Ibid.*

mengingat India dinilai belum cukup sempurna dari segi kepemilikan nuklir. Selanjutnya, dikatakan oleh Mitra bahwa India berada pada dilema antara prinsip negaranya yang bertentangan dengan situasi di Asia Selatan.

Konsep doktrin keamanan yang digunakan mampu menganalisis peringkat India dari segi power dan potensi power sebagai ancaman bagi negara lain. India tercatat meningkatkan anggaran belanja pertahanannya dan mengadakan kerja sama keamanan dengan negara di luar kawasan Asia Selatan. Sikap India ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negaranya pascaperang antarnegara di kawasan Asia Selatan. Pembuat kebijakan India tidak menyadari bahwa terdapat perbedaan persepsi atau pandangan dari dalam dan dari luar terhadap India. Alhasil, doktrin pertahanan India dirasa belum cukup jelas dan transparan.¹⁶ Oleh karena itu, India harus menjauhkan perhatiannya dari sisa peninggalan PD seperti *Non-Aligned Movement (NAM)* dan *Afro-Asian Solidarity* serta berfokus pada kesiapan untuk terlibat dalam situasi yang tidak ada hubungannya dengan national interest-nya.

Kajian Mitra berfokus pada perbedaan persepsi antara India dan negara-negara di kawasan Asia Selatan. Kebijakan India dinilai kurang memberikan perhatian lebih pada dinamika keamanan Asia Selatan. Oleh karena itu, yang membedakan studi Mitra dengan titik tekan penulis di dalam monograf ini ialah pada kebijakan pertahanan India dalam kaitannya dengan dinamika keamanan Asia Selatan.

Studi kedua ialah sebuah jurnal berjudul *India's Geo-strategic Environment* yang ditulis oleh Ashok Kapur, seorang profesor pada Departemen Ilmu Politik, *Waterloo University*, Kanada, pada tahun 1999. Jurnal ini dibuka dengan pernyataan bahwa India memiliki lingkungan geo-strategis yang kompleks.¹⁷ Hal ini disebabkan oleh perkembangan wilayah, isu-isu, dan juga aktor yang tergabung di dalamnya. Ketika berbicara mengenai geo-strategi, artinya sorotan akan berfokus pada organisasi penggerak dan perkembangan sistem dalam lingkup geografis. Pergerakan di sini mencakup dimensi ideologis, ekonomis, dan militer dimana masing-masingnya memiliki pola dan proses tersendiri.

Kapur menjelaskan geo-strategis India melalui beberapa isu yang terjadi antara India dengan beberapa negara lain. Pertama, adalah Tiongkok-Tibet-India dengan isu kerajaan Himalaya. Kedua, adalah Tiongkok-AS-Pakistan-India dengan isu Kashmir. Ketiga, adalah Afganistan-Iran-Pakistan, bersama Rusia, AS, Asia, India dan Tiongkok, dalam isu Taliban. Keempat, adalah Tiongkok-Myanmar-Teluk Bengal-Asia Tenggara dengan isu peningkatan perekonomian Yunan.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, 415.

¹⁸ *Ibid.*, 141.

¹⁷ Ashok Kapur, 1999, "*India's Geo-strategic Environment*". India International Center. Vol. 25 No. 4. 140.

Pembahasan pertama mengenai sengketa teritorial antara India dengan Tiongkok. Fokus utama sebenarnya ialah pada seberapa besar pengaruh keduanya dalam wilayah Himalaya.¹⁹ Juga berbicara tentang pembentukan balance of power dan pola hubungan antarnegara dimana persaingan antara keduanya dalam hal peningkatan power akan memengaruhi keberpihakan dari Himalaya itu sendiri. Misalnya, ketika India dianggap lemah power-nya, maka Tiongkok akan lebih mudah meningkatkan pengaruhnya pada wilayah Himalaya. Bisa dikatakan bahwa yang menjadi kunci dari isu ini ialah bagaimana persepsi Tiongkok terhadap arah kebijakan politik India dan kapabilitas militernya.

Pembahasan kedua adalah mengenai perdamaian di Kashmir dan hubungan antara India-Pakistan. Isu ini melibatkan Tiongkok yang memiliki hubungan nuklir dengan Pakistan dan AS. Dikatakan bahwa terdapat hubungan di antara kepentingan ketiga negara tersebut dengan kepemilikan dan percobaan nuklir India. Kemungkinan yang mungkin terjadi selanjutnya ialah kesadaran AS akan pengaruh Tiongkok dalam keamanan India dalam hal kepemilikan nuklir.²⁰ Isu ini memberikan perhatian lebih pada pemikiran AS terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku strategis India. Sementara, pemikiran AS sendiri dipengaruhi pula oleh tekanan atas strategi Tiongkok. Namun, isu Kashmir sendiri dinilai tidak terlalu berdampak serius terhadap hubungan antara AS, Tiongkok, dan negara di Asia Selatan.

Pembahasan ketiga adalah hubungan antara India dengan tetangga bagian barat lautnya, yaitu Afghanistan, mengenai Taliban. Isu-isu terkait antara lain mencakup politik minyak, perdagangan narkotika, politik keagamaan, dan terorisme. Namun, yang menjadi isu penting bagi India ialah masa depan Pakistan sebagai wilayah penyangga bagi India. Pakistan bisa saja terpengaruh tekanan yang kepentingan politik. Taliban telah memengaruhi dimensi politik Pakistan sehingga sulit untuk dikontrol.²¹ Terlihat bahwa isu ini adalah isu yang membawa dimensi agama yang mampu membentuk ketegangan antara Pakistan dan Tiongkok. Padahal, senjata konvensional dan kapabilitas misil Pakistan sebagian besar disediakan oleh Tiongkok. Taliban juga menjadi alat bagi AS untuk masuk dalam jalur perdagangan minyak di kawasan Asia Tengah. Berdasarkan pembahasan ini, dapat dikatakan bahwa Taliban sebagai salah satu aktor non negara mampu menciptakan hubungan yang kompleks yang tentu saja memengaruhi stabilitas keamanan India.

Pembahasan keempat mengenai gerakan yang diprediksi menjadi penting di kemudian hari berfokus pada hubungan antara Tiongkok dan Myanmar serta aktivitasnya di Teluk Bengal.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, 142.

²¹ *Ibid.*, 144.

Tiongkok memiliki kepentingan untuk membangun perekonomiannya di salah satu wilayahnya yang tertinggal, yaitu Yunan.²² Maka, Tiongkok mencoba mendapatkan akses air di Teluk Bengal untuk melancarkan kepentingannya tersebut. Hal yang menjadi masalah bagi India bukan hanya upaya Tiongkok dalam melebarkan pengaruh demi membangun bagian dari negaranya, melainkan berkaitan pula dengan kebijakan dan hubungan antara India dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah India. Sebab, hubungan ini akan memengaruhi keadaan geo-strategis India.

Kapur, di dalam studinya, menyatakan bahwa India harus lebih memperhatikan hubungannya dengan negara-negara di luar kawasan Asia Selatan. Ia juga menelaah hubungan itu dengan menggunakan konsep *balance of power*. Sedangkan, di dalam buku ini, penulis menggunakan *balance of power* sebagai salah satu konsep untuk memfokuskan analisis pada relasi India dengan negara-negara di satu kawasan yang sama dengan India, yaitu Asia Selatan. Sebab, penulis memandang bahwa lingkungan strategis India di Asia Selatan akan sangat memengaruhi stabilitas keamanan India sendiri.

Studi ketiga adalah jurnal yang berjudul *India's National Security Strategy: Imperative of Integrating Defence Policy* yang ditulis oleh Philip Campose (Letnan Jenderal Philip Campose) pada tahun 2016; Campose merupakan seorang Wakil Kepala Staff Angkatan Darat, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Peperangan Darat di New Delhi, India. Ia membuka pembahasan dengan pernyataan bahwa memiliki strategi keamanan nasional atau kebijakan pertahanan nasional yang formal sangatlah penting.²³ Meskipun dengan tidak adanya kebijakan formal artinya suatu negara dapat bertindak fleksibel, tetapi risiko melakukan kesalahan dalam menangani kasus yang berhubungan dengan keamanan pun akan meningkat.

Dalam jurnal ini dikatakan bahwa India, dengan kepemilikan nuklirnya dan sebagai negara yang bercita-cita menjadi kekuatan regional, tidak memiliki strategi keamanan nasional yang formal. Ketika kebijakan pertahanan nasional telah dirumuskan, kebijakan tersebut harus terintegrasi dengan baik dengan strategi keamanan nasional. Kebijakan dan strategi keamanan dan militer suatu negara menggambarkan tujuan nasional dari negara tersebut.²⁴ Dalam pembahasan ini, strategi keamanan India bukan hanya harus mampu menghadapi ancaman militer dari luar negara, melainkan juga harus mampu menghadapi berbagai ancaman internal dan ancaman non tradisional di masa yang akan datang. Strategi ini juga yang menjadi pedoman bagi India untuk mencapai kepentingan nasional

²²

Ibid.,

145.

²³ Philip Campose, 2016, "India's National Security Strategy: Imperative of Integrating Defence Policy". CLAWS Journal. 15.

²⁴ *Ibid.*, 16.

berupa keamanan tradisional dan non tradisional negaranya, baik di lingkup domestik, kawasan, maupun global.

Pada jurnal ini juga disebutkan bahwa Walter Lippman, seorang pengamat politik AS pasca-PD, menyatakan bahwa sebuah negara dikatakan memperoleh keamanan ketika ia tidak harus mengorbankan kepentingannya untuk menghindari perang, tetapi mampu mempertahankannya melalui perang. Sedangkan kapabilitas agenda dan tujuan pembangunan India masih harus menghadapi kendala alokasi anggaran pertahanan dan pembangunan.²⁵ Jurnal ini menegaskan bahwa keamanan dapat tercapai manakala perhatian bukan hanya diberikan pada ancaman dari luar, melainkan juga memperhatikan dan menyelesaikan ancaman dari dalam negara.

Bila diperhatikan dari penjelasan sebelumnya, Compose memfokuskan sorotannya pada keselarasan antara strategi keamanan dan kebijakan pertahanan India dalam menghadapi ancaman yang bersifat tradisional dan non tradisional. Sementara, penulis lebih menitik-beratkan pada ancaman yang bersifat tradisional. Penulis memandang, keamanan dalam konteks tradisional cenderung relevan bila berbicara mengenai hubungan antara India dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan.

Studi keempat adalah jurnal berjudul *Politics and Security in South-East Asia: Prospects for India-ASEAN Cooperation* yang ditulis oleh Shankari Sundararaman, seorang profesor Ilmu Internasional pada Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi, India, pada tahun 2004. Jurnal ini menganalisis hubungan antara India dengan kawasan Asia Tenggara. Pembahasan diawali dengan bagaimana dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara pascakrisis ekonomi tahun 1997 dan serangan teror di AS tahun 2001.²⁶ Konteks keamanan merupakan dimensi yang kompleks untuk dibahas meskipun hanya dalam satu kawasan, apalagi bila kawasan tertentu saling terhubung dengan kawasan yang lain, seperti Asia Tenggara dengan Asia Selatan. Kemudian, Sundararaman memaparkan bahwa terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan tersendiri bagi pendekatan keamanan pada kawasan tertentu.

Isu yang pertama adalah globalisasi yang dianggap sebuah keadaan dimana batasan-batasan antarnegara menjadi tidak relevan lagi. Hal ini tercermin dari hubungan antara kelompok-kelompok sosial internal suatu kawasan dengan kelompok eksternal. Isu yang kedua ialah pembangunan militer yang digambarkan dalam keadaan arms race di Asia Tenggara pasca-PD. Pengembangan militer dilakukan ketika hubungan internal dan bilateral dari negara di kawasan

²⁵ *Ibid.*, 19.

²⁶ Shankari Sundararaman, 2004, *Politics and Security in South-East Asia: Prospects for India-ASEAN Cooperation*. Sage Publications. 372.

berlangsung baik.²⁷ Selanjutnya, pada jurnal ini diungkapkan bahwa salah satu kunci hubungan antara India dengan kawasan Asia Tenggara melalui organisasi *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah Indonesia, sebagai tetangga maritim terdekat. Isu yang selanjutnya adalah ketidakstabilan politik, seperti yang terjadi di kawasan Asia Tenggara ketika proses demokratisasi. Struktur politik Asia Tenggara mengalami transformasi setelah menghadapi krisis ekonomi. Isu yang terakhir adalah terorisme, yang menjadi perhatian sejak serangan di AS pada tahun 2001 yang melemahkan rasa saling percaya antarnegara atau bahkan antarkawasan.

Berikutnya, jurnal ini membahas relasi antara India dengan ASEAN dimana keduanya merupakan anggota dari *the World Trade Organization* (WTO).²⁸ Dengan bekerja sama dalam bidang ekonomi, India dan kawasan Asia Tenggara meminimalkan dampak negatif dari isu-isu yang telah disebutkan sebelumnya. Hubungan baik antara India dengan kawasan Asia Tenggara juga terjalin dalam bidang kesehatan. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah proyek penelitian bersama terhadap penyakit menular serta produksi obat-obatan. Selain itu, India dan kawasan Asia Tenggara juga menjalin kerja sama di bidang teknologi, transportasi, dan pariwisata.

Penulis menemukan bahwa riset Sundararaman memberi perhatian lebih pada relasi India dengan negara-negara di luar kawasan melalui organisasi internasional untuk menjamin tercapainya kepentingan nasional India. Adapun monograf ini lebih berfokus pada relasi antara India dengan negara-negara di dalam kawasan Asia Selatan. Hal ini juga sejalan dengan kompleksitas hubungan antarnegara di Asia Selatan.

Studi kelima ialah jurnal berjudul *the Emergence of India as New Military Power: Threat or Opportunity to Southeast Asia?* yang ditulis oleh Mohamad Faisol Keling, Md. Shukri Shuib, dan Mohd Na'em Ajism pada tahun 2009; ketiganya merupakan dosen senior pada Universitas Utara Malaysia. Mereka mengawali pembahasan dengan pernyataan bahwa hadirnya India sebagai kekuatan militer baru memberikan dampak dan pengaruh bagi kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, India berdampingan dengan Asia Timur dan Asia Tenggara. India berproses meningkatkan kapabilitas militernya setelah beberapa kali terjadi perang antara India dan beberapa negara lain.²⁹ Keputusan India untuk menjadikan negaranya dipandang sebagai negara yang kuat pun diwujudkan setelah melakukan berbagai pertimbangan kepentingan politik yang menyangkut kedaulatan India sendiri.

Pada kawasan Asia Timur sendiri, kekuatan militer yang hadir adalah Tiongkok. Hal ini menyebabkan Asia Tenggara membangun perhatian lebih terhadap keamanan negaranya. Kini, India

²⁷ *Ibid.*, 375

²⁸ *Ibid.*, 383.

²⁹ M.F. Keling, Md. S. Shuib, and M.N. Ajis, 2009, "The Emergence of India as New Military Power: Threat or Opportunity to Southeast Asia?" *Asian Social Science*. Vol. 5 No. 4. 22.

pun hadir menjadi negara dengan kekuatan militer di Asia Selatan, sehingga Asia Tenggara semakin berfokus pada pertahanan keamanan negaranya. Hubungan antara India dan Tiongkok merupakan hubungan persaingan kapabilitas militer.³⁰ Hal ini juga yang menjadi faktor pendorong bagi India untuk menjadi negara superpower di kawasan Asia Selatan. Kemanan regional dicapai melalui hubungan kerja sama dengan negara-negara yang berpotensi di sekitar kawasan. Dalam konteks sebagai kekuatan baru di Asia Selatan, India membuat negara-negara, terutama di Asia Tenggara, merasa terancam.

Kapabilitas militer India yang semakin meningkat akan memengaruhi isu-isu geo-politik di antara kedua kawasan tersebut. Sedangkan, bila dilihat dari peluangnya, India dapat menjadi salah satu cara bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menstabilkan power³¹ antara Asia Tenggara dengan dua negara superpower di kawasan Asia Timur. Kedua negara tersebut adalah Tiongkok dan Jepang yang sudah terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan Asia Tenggara. India diharapkan juga mampu menjaga stabilitas pengaruh Tiongkok dan Jepang di kawasan Asia Tenggara agar tidak terlalu mendominasi lingkungan strategis. India dan Asia Tenggara sadar bahwa masing-masing memiliki kepentingan, maka keduanya tentu berupaya menjalin hubungan/kerja sama yang saling menjanjikan, baik formal maupun informal.

Penjelasan sebelumnya memberikan gambaran bahwa India berpengaruh terhadap keamanan kawasan-kawasan yang berbatasan dengan Asia Selatan. Maka, yang membedakan jurnal ini dengan monograf yang Anda baca ini ialah pada fokus perihal dinamika lingkungan strategis India di Asia Selatan. Adapun rangkuman terhadap kelima studi yang penulis anggap sebagai mata rantai disajikan pada Tabel 2.

³⁰ Robert Scalapino, *Asia and the Road Ahead: Issues for the Major Powers* (Berkeley: University of California Press), 1975, 122.

³¹ MF Keling, Md S Shuib, & MN Ajis, *Op. Cit.*, 25.

Tabel 2. Sejumlah Studi terkait India

No.	Studi 1	Studi 2	Studi 3	Studi 4	Studi 5
Judul	The Reluctant Hegemon: India's self-perception and the South Asian Strategic Environment	India's Geo-strategic Environment	India's National Security Strategy: Imperative of Integrating Defence Policy	Politics and Security in South-East Asia: Prospects for India-ASEAN Cooperation	The Emergence of India as New Military Power: Threat or Opportunity to Southeast Asia?
Penulis	Subrata K Mitra (2003)	Ashok Kapur (1999)	Philip Campose (2016)	Shankari Sundararaman (2004)	MF Keling, Md S Shuib, & MN Ajis (2009)
Teori/ Konsep	Security Doctrine	Balance of Power	Defense Policy	National Policy	Balance of Power dan National Interest
Argumen Utama	Kebijakan India terlalu fokus kepada isu yang dianggap berpengaruh secara langsung	India memiliki lingkungan geo-strategis yang sangat kompleks, terutama di wilayah perbatasan	Strategi keamanan nasional atau kebijakan pertahanan nasional yang formal sangat	Hubungan antar kawasan merupakan hal yang kompleks, terlebih lagi terdapat beberapa isu	Kehadiran India sebagai kekuatan regional di kawasan Asia Selatan memberikan dampak berupa

No.	Studi 1	Studi 2	Studi 3	Studi 4	Studi 5
	terhadap kepentingan negaranya, tetapi belum mampu menanggapi situasi keamanan di kawasan Asia Selatan.	yang mengharuskan India berhubungan dengan negara-negara di luar kawasan.	penting bagi suatu negara untuk mempertahankan keamanan dan mencapai tujuan nasionalnya.	yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjalin hubungan baik dengan aktor diluar kawasan.	ancaman sekaligus peluang bagi kawasan Asia Tenggara dalam konteks keamanan dan ekonomi.
Fokus Telaah	Perbedaan persepsi antara India dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan	Kompleksitas lingkungan geo-strategis India	Integrasi antara strategi kemandirian dan kebijakan pertahanan India dalam konteks keamanan tradisional dan non tradisional	Hubungan kerja sama antara India dengan kawasan Asia Tenggara melalui organisasi regional yaitu ASEAN	Pengaruh India bagi lingkungan keamanan kawasan Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara.
Telaah di dalam monografi ini	Berfokus kepada kebijakan India yang dianalisis dengan konsep	Memberi perhatian lebih terhadap isu antara negara-negara di	Memusatkan perhatian kepada kebijakan pertahanan India dalam konteks	Memberi penekanan pada hubungan kawasan dengan negara-	Menelaah dinamika lingkungan strategis di Asia Selatan

No.	Studi 1	Studi 2	Studi 3	Studi 4	Studi 5
	<i>defense policy</i> dan <i>arms dynamic</i> .	dalam kawasan Asia Selatan.	keamanan tradisional.	negara yang ada di dalamnya.	

Sumber: Dikompilasi dari Subrata K. Mitra, Op. Cit.; Ashok Kapur, Op. Cit.; Philip Campose, Op. Cit.; Shankari Sundararaman, Op. Cit.; MF Keling, Md S Shuib, & MN Ajis, Op. Cit.

2.2. Kerangka Analitis

Monograf ini menggunakan teori dan konsep yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan dinamika lingkungan strategis, yaitu konsep *defence policy*, *strategic environment*, *arms dynamic*, *national interest*, *deterrence*, *balance of power*, dan *security dilemma*.

2.2.1. Kebijakan Pertahanan (*Defence Policy*)

Defence merupakan salah satu konsep keamanan dalam bentuk pertahanan atau bertahan. Konsep ini dapat diterapkan melalui tindakan dimana suatu negara menggunakan kekuatan terhadap aset militer negara lain untuk menangkis dan membatasi kerugian (yang mungkin terjadi) dari serangan negara itu guna mempertahankan kendali wilayahnya serta menghindari negara lain memaksakan kehendaknya atas negaranya.³²

Sedangkan *defence policy* merupakan salah satu bentuk penerapan konsep *defence* melalui kebijakan³³ suatu negara. Kebijakan ini kemudian menentukan tindakan yang akan

³² K.R. Adams, 2003, "Attack and Conquer? *International Anarchy and the Offense-Defense-Deterrence Balance*". *International Security*. Vol. 28 No. 3. 53.

³³ Kebijakan secara umum diartikan sebagai proses perumusan keputusan atau aksi yang dilakukan oleh setiap aktor hubungan internasional (dalam hal ini adalah negara) dalam mempertahankan kepentingan dan keamanan nasionalnya. Lihat selengkapnya Sherri Torjman, *What is Policy?* (Canada: *the Caledon Institute of Social Policy*, 2005). Secara khusus, penelitian ini menjelaskan kebijakan pertahanan negara sebagai reaksi atau respons atas perubahan lingkungan strategis

dilakukan suatu negara untuk menjaga dan mempertahankan keamanan negaranya. Dalam monograf ini, konsep defence policy digunakan untuk menganalisis respons/kebijakan India terhadap dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Selatan dari tahun 2014 hingga 2017.

2.2.2. Lingkungan Strategis (*Strategic Environment*)

Monograf ini juga menggunakan konsep *strategic environment* atau lingkungan strategis dalam memandang dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Selatan. Menurut Clausewitz, lingkungan strategis adalah kondisi yang terbentuk akibat perbedaan tekanan, kesempatan, dan pemikiran yang rasional dari setiap aktor yang terlibat dalam hubungan internasional. Dengan kata lain, lingkungan strategis dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis yang memungkinkan salah satu aktor mendominasi kawasan tertentu.³⁴ Sementara itu, dengan terminologi lain yang relatif dekat, Libor Frank, seorang Kepala Departemen Ilmu Keamanan dan Strategi Militer pada *Czech Republic of Defence University*, memaparkan bahwa “*Security environment is an external environment affecting national security policy. It can be seen as an area where national interests are implemented and where these faces interests of other actors within the system of international relations and where those processes take place substantially influencing the level of national security.*”³⁵

Menurut Frank, lingkungan strategis menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara. Kemudian Frank juga menjelaskan bahwa setiap aktor dalam level internasional akan saling mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Berdasarkan definisi di atas, penulis menggunakan konsep ini untuk melihat perubahan lingkungan strategis di Asia Selatan karena terjadi banyak konflik internal kawasan, sehingga menyebabkan India, sebagai salah satu negara di Asia Selatan, merespon hal tersebut guna mempertahankan keamanan negara serta menjaga kepentingan nasionalnya.

2.2.3. Dinamika Persenjataan (*Arms Dynamic*)

Di dalam dunia internasional, dimensi keamanan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap negara dimana hubungan antara satu negara dengan negara yang lain saling dilandasi oleh rasa saling curiga. Hal inilah yang mendorong setiap negara untuk meningkatkan kawasan/regionalnya terhadap stabilitas keamanannya dalam bentuk penguatan kapabilitas pertahanan/militer.

³⁴ Michael Howard, *the Strategic Environment*, 1997, 9.

³⁵ Libor Frank, 2016, “*The Czech Republic Security Environment*”. Research Gate. 7.

kapabilitas militernya dan pada akhirnya membawa mereka ke dalam kondisi arms race atau perlombaan senjata.

Konsep arms dynamic sendiri merupakan konsep yang hampir serupa dengan arms race. Namun, jika arms race konteksnya adalah saling berkompetisi karena rasa takut terhadap potensi kekuatan militer negara lain, *arms dynamic* justru lebih kompleks, yakni mencakup jenis peningkatan kekuatan militer itu sendiri. Peningkatan kapabilitas militer dapat berupa peningkatan dari segi kuantitas ataupun kualitas. Terdapat tiga model yang saling melengkapi yang dapat menjelaskan proses suatu negara meningkatkan kapabilitas militer negaranya, yaitu *action-reaction model*, *the domestic structure model*, dan *the technological imperative*.³⁶ Pada bagian berikut akan dijelaskan masing-masing model tersebut.

2.2.3.1. Model Aksi-Reaksi (*Action-Reaction Model*)

Model ini menjelaskan bahwa suatu negara meningkatkan kapabilitas militernya sebagai reaksi/respons atas peningkatan kapabilitas militer negara lain. Maka, dapat dikatakan, model ini mengartikan perlombaan senjata dan dinamika keamanan dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar suatu negara itu sendiri. Setelah menguji idiom (ungkapan) dari aksi-reaksi, yakni berupa jenis-jenis aksi/tindakan yang dilakukan oleh negara-negara dalam proses, di dalam model ini juga terdapat **tiga variabel** yang digunakan untuk mengidentifikasi respons dari suatu negara terhadap peningkatan kapabilitas militer negara lain.

Pertama, **magnitude** yang dapat diartikan sebagai besaran atau ukuran dari penyebab terjadinya respons. Kedua, **timing** guna melihat seberapa cepat respons atau reaksi suatu negara terhadap negara lainnya. Ketiga, **awareness** yang berbicara mengenai kesadaran suatu negara dalam melakukan aksi atau respons terhadap negara lain.³⁷ Seluruh variabel tersebut kemudian dilengkapi juga oleh **motives** (motif) dari suatu negara dalam melakukan tindakan yang menyangkut keamanannya. Penulis menggunakan ketiga variabel tersebut dalam memandang respons India terhadap perubahan lingkungan strategis di Asia Selatan.

³⁶ Barry Buzan, *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations* (London: MacMillan Press), 1987, 73.

³⁷ *Ibid*, 74.

2.2.3.2. Model Struktur Domestik (*The Domestic Structure Model*)

Model struktur domestik melihat dinamika persenjataan yang terjadi dipengaruhi pula oleh dimensi ekonomi dan politik suatu negara.³⁸ Model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi aksi suatu negara yang mendominasi suatu kawasan tertentu. Dalam hal ini, India dianggap menjadi negara yang mendominasi kawasan Asia Selatan. Penulis menggunakan konsep ini dalam memandang sikap India sebagai negara yang memiliki 'pengaruh' di kawasan Asia Selatan.

2.2.3.3. Model Teknologi Imperatif (*The Technological Imperative*)

Model teknologi imperatif ini lebih memaknai dinamika persenjataan sebagai bagian dari kemajuan teknologi dimana setiap negara berupaya untuk meningkatkan kualitas persenjataan negaranya agar tetap merasa aman.³⁹ Maka, model ini mengidentifikasi respons atau aksi suatu negara berdasarkan dimensi ilmu pengetahuan dan teknik keahlian. Penulis dapat melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan India dalam meningkatkan kapabilitas militer negaranya.

2.2.4. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Dalam arti luas, *national interest* (kepentingan nasional) mengacu pada tujuan kebijakan luar negeri; tujuan atau preferensi kebijakan yang menguntungkan Masyarakat secara keseluruhan (kebijakan luar negeri yang setara dengan 'kepentingan publik'). Konsep ini sangat terkait erat dengan keamanan nasional, kelangsungan hidup, dan pengejaran kekuasaan.⁴⁰ Dengan kata lain, *national interest* merupakan objek yang menjadi tujuan dari setiap negara dalam bersaing dengan negara lain.

Sedangkan menurut Hans J. Morgenthau, *national interest* merupakan salah satu variabel penting yang harus diperhitungkan oleh setiap negara sebelum menerapkan keputusan politik, sehingga *national interest* menjadi standar utama kebijakan suatu negara.⁴¹ Berdasarkan definisi tersebut, penulis menggunakan konsep ini untuk melihat sikap India dalam merumuskan kebijakan pertahanannya.

³⁸ *Ibid*, 95.

³⁹ *Ibid*, 106.

⁴⁰ Andrew Heywood, *Op. Cit.*, 130.

⁴¹ Mihaela Neascu, *Hans J. Morgenthau's Theory of International Relation: Disenchantment and Re-Enchantment* (London: Palgrave Macmillan), 2009, 143.

2.2.5. Penggentaran (*Deterrence*)

Deterrence diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menghentikan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Konsep ini mencakup *denial* (penangkalan) dan *retaliation* (pembalasan). Konsep *deterrence* seringkali dilakukan dalam bentuk ancaman militer. Hal ini bertujuan menghalau aktor lain yang ingin bertindak agresif, dengan terlebih dahulu memberikan rasa takut kepada pihak lawan.⁴² Jadi, bentuk pertahanan ini dilakukan sebelum datangnya serangan lawan, bukan setelahnya. Konsep ini digunakan untuk melihat tindakan India melalui kebijakan pertahanannya dalam merespons dinamika keamanan kawasan Asia Selatan.

2.2.6. Perimbangan Kekuatan (*Balance of Power*)

Balance of power atau perimbangan kekuasaan diartikan sebagai keadaan di mana distribusi kekuasaan pada setiap negara hampir setara.⁴³ Konsep *balance of power* di sini menggambarkan bagaimana negara-negara di kawasan Asia Selatan saling berupaya meningkatkan kapabilitas militernya demi tercapainya rasa bebas dari ancaman.⁴⁴ Hal ini dilihat dari jumlah kepemilikan persenjataan negara-negara di kawasan Asia Selatan.

2.2.7. Dilema Keamanan (*Security Dilemma*)


Konsep ini merupakan gambaran dari apa yang terjadi antara negara-negara di kawasan Asia Selatan, terutama India. *Security dilemma* adalah kondisi dimana negara-negara merasa khawatir akan potensi militer yang dimiliki oleh negara lain.⁴⁵ Akibatnya, rasa kekhawatiran tersebut menyebabkan negara merasa tidak aman dan ikut meningkatkan kapabilitas militer sebagaimana yang dilakukan oleh negara lain. Situasi ini tergambar dalam sikap setiap negara

⁴² Barry Buzan, *Op. Cit.*, 136.

⁴³ P.R. Viotti dan M.V. Kauppi, *International Relations and World Politics* (New Jersey: Pearson Prentice Hall), 2012, 200.

⁴⁴ Konsep lain yang berdekatan dengan *balance of power* adalah *balance of threat* yang dikemukakan oleh Profesor Stephen M. Walt, seorang mahaguru bidang Hubungan Internasional pada Harvard University, di dalam artikelnya yang berjudul "Alliance Formation and the Balance of World Power", *International Security*, Spring 1985. Kemudian, pemikirannya tersebut dikembangkan menjadi sebuah buku yang berjudul *The Origin of Alliances* (Ithaca: Cornell University Press, 1987). Menurut penulis, konsep *balance of threat* lebih tepat diterapkan pada kondisi ketika negara-negara menjalin aliansi. Sedangkan, pada penelitian ini, India sebagai objek analisis, tidak menjalin aliansi dengan negara manapun dan hanya menjalin kerja sama keamanan. Dengan demikian, konsep *balance of power* lebih relevan digunakan pada penelitian ini.

⁴⁵ Shiping Tang, *a Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism* (New York: Palgrave Macmillan), 2010, 39.



di Asia Selatan yang berusaha meningkatkan kapabilitas militer negaranya, yang kemudian berpengaruh pula terhadap dinamika lingkungan strategis di kawasan.

MONOGRAF

**INDIA YANG RESPONSIF &
PROVOKATIF DI MANDALA
ASIA SELATAN**

B A B

03

INDIA YANG RESPONSIF & PROVOKATIF DI MANDALA ASIA SELATAN

Bab ini menguraikan tentang India, yakni berupa letak geografis, sejarah kemerdekaan, pemerintahan, ekonomi, kekayaan alam, serta kondisi keamanan negara berdasarkan pernyataan menteri pertahanan dan dari sejumlah literatur terkait sejarah masing-masing negara. Uraian ini diharapkan akan mampu memberikan dukungan bagi pembaca guna memahami relasi India dengan dinamika lingkungan strategisnya di Asia Selatan, khususnya dalam hal kebijakan pertahanan. Data yang dipaparkan pada bagian berikut merupakan data berdasarkan laman resmi Pemerintahan India.

3.1. Sekilas tentang India

India merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Negara ini terletak diantara 8° dan 37° Lintang Utara, serta 68° dan 97° Bujur Timur.⁴⁶ Dengan total luas wilayah India adalah sekitar 3,2 juta km² dengan jumlah populasi 1,2 juta jiwa,⁴⁷ India merupakan negara yang dikelilingi oleh Teluk Bengala di bagian timur, Laut Arab di barat, dan Samudera Hindia di selatan.⁴⁸

Awalnya, pada tahun 1600-an, Inggris menyebarkan pengaruhnya di India melalui sebuah perusahaan the British East India yang menjadi pembuka jalur perdagangan rempah-rempah antara India dan Eropa. Selama ratusan tahun, India berada dibawah tekanan Inggris hingga Mahatma Gandhi⁴⁹ datang kembali ke India pada tahun 1914 dan menyerukan perlawanan dan berupaya mewujudkan kemerdekaan India melalui gerakan satyagraha-nya. Ia mengatakan

⁴⁶ Data bersumber dari situs web *National Portal of India*. (www.india.gov.in).

⁴⁷ *The International Institute for Strategic Studies (IISS), the Military Balance*, (London: IISS), 2018. 260.

⁴⁸ Data bersumber dari situs web *National Portal of India*. (www.india.gov.in).

⁴⁹ Mohandas Karamchand Gandhi merupakan seorang pejuang hak yang berasal dari India dan dipuji sebagai seorang pahlawan bagi masyarakat India. Gandhi menyelesaikan pendidikannya pada bidang hukum di Inggris, lalu mempraktikkan ilmunya di Afrika. Selama 20 tahun berada di sana, ia banyak menerima diskriminasi, sehingga hal tersebut kemudian mendorongnya memahami filosofi pembangkangan sipil yang dikenal dengan 'satyagraha' (kekuatan kebenaran) sebagai bentuk perlawanan secara damai terhadap rasisme. Lihat selengkapnya Susan Muaddi Darraj, *the Indian Independence Act of 1947* (New York: the Chelsea House, 2011).

bahwa Inggris telah mengeksploitasi India⁵⁰ dan melunturkan nilai-nilai budaya India dengan penyebaran nilai-nilai barat.

Perjuangan Gandhi membuahkan hasil, sehingga pada tahun 1935 Undang-Undang Pemerintah India disahkan⁵¹ dan itu kemudian membuka lebih banyak lagi peluang bagi bangsa India untuk berperan dalam bidang pemerintahan. India memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus tahun 1947⁵² melalui Undang-Undang Kemerdekaan India. Di hari yang sama, Perdana Menteri pada saat itu, Jawaharlal Nehru, menyampaikan sebuah pidato dalam Majelis Konstituen India. Nehru menyampaikan:

“Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity”⁵³

Dalam pidatonya, Nehru mengatakan bahwa saat itu adalah waktu yang telah lama ditunggu oleh bangsa India setelah mendapatkan tekanan selama bertahun-tahun. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai era baru yang akan ditempuh oleh India sebagai negara yang merdeka. Setelah mendapatkan kemerdekaannya, segi perekonomian dan militer India mulai menjadi perhatian bagi pemerintah. Setelah masa pemilihan umum tahun 2014,

⁵⁰ Susan Muaddi Darraj, *the Indian Independence Act of 1947* (New York: the Chelsea House), 2011, 8.

⁵¹ *Ibid.*, 55.

⁵² *Ibid.*, 11.

⁵³ Jawaharlal Nehru ‘Tryst with Destiny’, in Priyamvada Gopal, *Literary Radicalism in India* (New York: Routledge), 2005, 13.

India mulai bangkit dari keterpurukan yang melanda bidang perekonomiannya⁵⁴, dengan harapan akan terjadi peningkatan GDP sekitar 5,6 - 6,4% sejak tahun 2014 hingga 2015.⁵⁵

India membangun kembali stabilitas ekonominya melalui kebijakan berupa penguatan pada jalur investasi dan aktivitas ekspor.⁵⁶ Bentuk penguatan pada bidang perekonomian tergambar pula dari meningkatkan kepercayaan bisnis dan aktivitas manufaktur.⁵⁷ Namun, seiring penguatan tersebut, juga terjadi inflasi hingga 7,5% sampai dengan tahun 2015 yang disebabkan oleh penerapan pajak barang dan jasa yang tidak tepat sasaran⁵⁸, sehingga GDP sempat mengalami penurunan pada tahun 2015.⁵⁹

Selanjutnya, pada tahun 2016, harga komoditas kembali stabil sehingga terjadi penurunan pada persentase tingkat inflasi. Kondisi perekonomian India semakin kuat melalui kebijakan yang efektif dalam memaksimalkan keuntungan dari jalur perdagangan⁶⁰ dan terjadi peningkatan sebesar 7,4% terhadap GDP India pada tahun 2017. Pertumbuhan India diekspektasikan akan meningkat 7,3% pada tahun 2018 dan 7,4% di tahun 2019. Pasang surut perekonomian India ini merefleksikan beberapa guncangan (yang terjadi pada perekonomian India pascapenerapan pajak barang dan jasa), serta penguatan investasi dan konsumsi.⁶¹ Terdapat beberapa alasan yang membuat perekonomian India meningkat dengan pesat, yaitu Penekanan pemerintah India kepada pembangunan dalam negeri; Peningkatan pada sektor investasi dan pajak; Perhatian pada perdagangan luar negeri; Pertumbuhan populasi; s e r t a Perkembangan teknologi informasi.⁶²

Dalam konteks kekayaan alam, India merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya mineral terbesar di dunia. India tercatat kaya akan batubara, lignit, minyak bumi, dan gas alam. India merupakan negara penghasil batubara terbesar ketiga di dunia dengan sebagian besar batu baranya terletak di wilayah bagian timur yang merupakan hasil eksplorasi hingga kedalaman 1.200 m.

⁵⁴ *International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook: Legacies, Clouds, and Uncertainties.* 2014. 8.

⁵⁵ *Ibid.*, 54.

⁵⁶ *Ibid.*, 10.

⁵⁷ *Ibid.*, 53.

⁵⁸ *International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook: Subdued Demand Symptoms and Remedies.* 2016. 33.

⁵⁹ *Op. Cit.*, 55.

⁶⁰ *World Economic Outlook* 2016, 5.

⁶¹ *International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth.* 2018. 40.

⁶² Angus Maddison, *Class Structure and Economic Growth: India and Pakistan since the Moghuls* (New York: Routledge), 1971, 76-78.

Tabel 3. Estimasi Cadangan Batubara di India Tahun 2017

Wilayah	Jumlah (Miliar Ton)
Andhra Pradesh	1.58
Arunachal Pradesh	0.09
Assam	0.51
Bihar	1.35
Chhattisgarh	56.66
Jharkhand	82.44
Madhya Pradesh	27.67
Maharashtra	12.26
Meghalaya	0.58
Nagaland	0.41
Orissa	77.29
Sikkim	0.10
Telangana	21.46
Uttar Pradesh	1.06
West Bengal	31.67
Total	315.14

(Sumber: Office of Coal Controller dan Ministry of Coal)

Data dihimpun dari Office of Coal Controller dan Ministry of Coal melalui Energy Statistics 2018 (Twenty Fifth Issue) yang dipublikasi oleh Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, di New Delhi pada bulan Maret 2018.

Selain menjadi sumber energi utama bagi pembangkit listrik di India, batubara juga digunakan oleh berbagai industri kecil dan menengah seperti industri baja, semen, dan pupuk.⁶³ Tiga wilayah teratas yang menyimpan batubara dengan jumlah paling tinggi adalah Jharkhand (82,44 miliar ton), Orissa (77,29 miliar ton), dan Chhattisgarh (56,66 miliar ton). Lihat Tabel 4 yang memetakan cadangan batubara di India.

Sedangkan pada bagian selatan, terutama wilayah Tamil Nadu, terdapat lignit dalam jumlah besar yang hampir seluruhnya digunakan untuk pembangkit listrik. Tamil Nadu merupakan wilayah dengan jumlah Lignit terbesar yaitu 35,78 miliar ton. Kemudian disusul oleh Rajasthan dan Gujarat, dengan masing-masing 5,74 dan 2,72 miliar ton (lihat Tabel 5 terkait ramalan jumlah lignit di India).

Tabel 4. Estimasi Cadangan Lignit di India Tahun 2017

Wilayah	Jumlah (miliar ton)
Gujarat	2.72
Jammu & Kashmir	0.03
Kerala	0.01
Pondicherry	0.42
Rajasthan	5.74
Tamil Nadu	35.78
Total	44.70

Sumber: Office of Coal Controller dan Ministry of Coal; the World Energy Council (WEC); <<https://www.worldenergy.org/data/resources/country/india/coal/>> yang diakses pada 11 Desember 2018.

⁶³ Hal ini berdasarkan data dari *the World Energy Council (WEC)* sebagai Badan Energi Global terakreditasi PBB yang menginformasikan strategi energi global, regional, dan nasional dengan menyelenggarakan acara tingkat tinggi, yang menerbitkan studi otoritatif dan bekerja melalui jaringan dengan anggota yang luas untuk memfasilitasi dialog kebijakan energi dunia, melalui laman <<https://www.worldenergy.org/data/resources/country/india/coal/>> yang diakses pada 11 Desember 2018.

Sementara, bagian wilayah timur laut India, yaitu Assam, menjadi ladang minyak satu-satunya bagi India selama lebih dari 60 tahun sejak awal ditemukan pada tahun 1890-an hingga akhirnya pada tahun 1960-an mulai ditemukan beberapa titik penghasil minyak lainnya di wilayah lepas pantai Barat yang kemudian menjadi penghasil minyak terbesar di India. Selanjutnya, pada akhir tahun 2012 ditemukan pula wilayah lainnya yang memiliki potensi minyak bumi cadangan seperti Gujarat dan Rajasthan.⁶⁴

Selain batubara, lignit, dan minyak bumi, India juga menjadi negara dengan jumlah gas alam yang relatif tinggi. Pada tahun 2014, konsumsi gas alam India lebih besar dibandingkan produksinya, sehingga India menjadi pengimpor gas alam yang besar, terutama dari Qatar. Berbeda dengan batubara yang menjadi sumber energi utama, gas alam hanya bertanggung jawab atas sekitar 7% dari kebutuhan energi utama India.⁶⁵ Sebaran minyak bumi dan gas alam India terdapat pada Tabel 6.

Tabel 5. Estimasi Cadangan Minyak Bumi dan Gas Alam

Wilayah	Minyak Bumi (juta ton)	Gas Alam (miliar m ³)
Arunachal Pradesh	1.52	0.93
Andhra Pradesh	8.15	48.31
Assam	159.96	158.57
Gujarat	118.61	62.28
Lepas Pantai Barat	239.20	302.35
Lepas Pantai Timur	40.67	507.76
Nagaland	2.38	0.09
Rajasthan	24.55	34.86

⁶⁴ Dikutip dari situs web *World Energy Council* melalui <<https://www.worldenergy.org/data/resources/country/india/oil/>> yang diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

⁶⁵ Dikutip dari situs web *World Energy Council* melalui <<https://www.worldenergy.org/data/resources/country/india/gas/>> yang diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

Tamil Nadu	9.00	31.98
Tripura	0.07	36.10
Total	604.1	1183.23

Sumber: Office of Coal Controller dan Ministry of Coal; Dikutip dari situs web World Energy Council melalui <<https://www.worldenergy.org/data/resources/country/india/gas/>> yang diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

Dalam hal kepemilikan minyak bumi, India mengandalkan wilayah lepas pantai barat dengan total 329,20 juta ton. Wilayah Assam dan Gujarat masih cukup tinggi dengan 159,96 dan 118,61 juta ton. Tripura menjadi wilayah dengan cadangan minyak bumi terendah di India hingga tahun 2017.

Jika wilayah lepas pantai barat memimpin dalam jumlah minyak bumi, lepas pantai timur menjadi wilayah dengan jumlah gas alam tertinggi di India, yaitu 507,76 miliar m³. Namun, lepas pantai barat masih menduduki posisi kedua dengan 302,35 miliar m³ gas alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya Assam (158,57 miliar m³), Gujarat (62,28 miliar m³) dan Andhra Pradesh (48,31 miliar m³) menjadi tiga wilayah dengan jumlah gas alam yang cukup tinggi. Jumlah kekayaan mineral yang demikian, menjadi salah satu alasan bagi India dalam mempertahankan keamanan negaranya.

Dalam hal keamanan, India bergabung dengan 27 negara lainnya di kawasan Asia-Pasifik dalam pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh the IISS, yaitu, Shangri-La Dialogue. Pertemuan ini merupakan pertemuan antara pemerintah terkait bidang pertahanan setiap negara guna membangun kepercayaan diri serta mendorong kerja sama keamanan praktis⁶⁶, dengan memfasilitasi komunikasi yang mudah dan kontak yang bermanfaat di antara para pembuat kebijakan pertahanan dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik.

Selanjutnya, penulis memberikan paparan mengenai keterlibatan India dalam Shangri-La Dialogue pada tahun 2015 hingga tahun 2018 guna mengetahui bentuk ancaman bagi India selama periode tahun tersebut. Adapun alasan penggunaan tahun tersebut adalah karena sesuai dengan batasan tahun penelitian penulis di dalam riset ini. Pada tahun 2015, India mendelegasikan Menteri Negara untuk Pertahanan-nya, yaitu Rao Inderjit Singh, guna menghadiri Shangri-La Dialogue ke-14 dengan tema 'New Forms of Security Collaboration in Asia' di Singapura. Di dalam forum tersebut, Inderjit Singh berargumen bahwa ancaman terbesar bagi negara pada saat itu ialah ekstrimisme

⁶⁶ Bersumber dari situs web resmi *the International Institute for Strategic Studies*. (www.iiss.org).

agama dan perkembangan terorisme. Selain itu, dengan garis pantai sepanjang 7.500 km, 1.200 pulau, dan 2,4 juta km² zona ekonomi eksklusif,⁶⁷ India sangat memperhatikan keamanan wilayah perairannya. Singh juga beranggapan, penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan ancaman yang berpotensi hadir melalui jalur laut atau prairan.

Kemudian pada tahun 2016, perwakilan India pada Shangri-La Dialogue ke-15 adalah Manohar Parrikar, Menteri Pertahanan India. Di dalam pidatonya, ia memaparkan pandangannya bahwa terdapat tiga tantangan keamanan utama⁶⁸ yang sedang dihadapi oleh kawasan. Pertama, sengketa wilayah yang memicu terjadinya konflik militer sehingga perlu adanya resolusi perdamaian tanpa penggunaan ancaman dan kekerasan. Kedua, terorisme yang merupakan isu keamanan non tradisional terpenting yang sedang dihadapi oleh India. Namun, kerangka keamanan India sendiri belum cukup tegas dalam menanggulangi isu terorisme. Ketiga, tantangan keamanan yang sedang dihadapi oleh India datang dari wilayah yang (bagi India) rentan akan ancaman, yaitu maritim.

Forum Shangri-La Dialogue ke-16 kembali diadakan di Singapura pada pertengahan tahun 2017. Namun, Arun Jaitley, Menteri Pertahanan India pada saat itu, memutuskan untuk tidak menghadiri forum tersebut. India kembali berpartisipasi melalui Perdana Menteri Shri Narendra Modi dalam Shangri-La Dialogue ke-17 pada tahun 2018. Pada kesempatan itu, Modi menyampaikan bahwa India telah dan akan tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia-Pasifik, baik dalam bentuk kerja sama pertahanan maupun ekonomi.⁶⁹ Hal ini dilakukan oleh India guna menjamin masa depan dan eksistensinya di dalam kawasan Asia-Pasifik. Ia juga menekankan upaya integritas negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk meminimalkan konflik, terutama yang disebabkan oleh sengketa wilayah. Berdasarkan paparan mengenai India yang mencakup letak geografis, sejarah kemerdekaan, pemerintahan, sumber daya alam, perekonomian, serta keamanan India, maka diharapkan pembaca mendapat gambaran mengenai India, sehingga membantu memahami situasi aksi-reaksi yang terjadi antara India dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia Selatan tahun 2014–2017 yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

3.2. Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Selatan, 2014–2017

Bagian ini menjelaskan perubahan lingkungan strategis yang terjadi di kawasan Asia Selatan. Ia akan dijelaskan melalui kondisi pembangunan kekuatan militer negara-negara di Asia

⁶⁷ *Minister of State for Defence of India's speech in 14th Asia Security Summit, the IISS Shangri-La Dialogue 2015.*

⁶⁸ *Minister of Defence of India's speech in 15th Asia Security Summit, the IISS Shangri-La Dialogue 2016.*

⁶⁹ *Keynote Address of Prime Minister of India, Shri Narendra Modi in 17th Asia Security Summit, the IISS Shangri-La Dialogue 2018.*

Selatan sejak tahun 2014 hingga 2017. Pembangunan kekuatan militer sendiri, menurut pandangan penulis, adalah relevan untuk menggambarkan kondisi relasi antarnegara di Asia Selatan yang relatif konflikual. Berdasarkan pandangan Morgenthau, setiap negara akan selalu meningkatkan kesiapan militer negaranya guna mencapai rasa aman.⁷⁰

Kesiapan militer merupakan satu dari delapan elemen yang mampu menentukan power dari suatu negara.⁷¹ Adapun alasan penulis menggunakan 'power' sebagai tolok ukur atas perubahan lingkungan strategis yang terjadi di Asia Selatan ialah karena power dan setiap tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara dan saling memengaruhi satu sama lain, sehingga akan terjadi perubahan lingkungan strategis di Asia Selatan ketika setiap negara di kawasan bertindak dengan memaksimalkan power-nya masing-masing.

Upaya memaksimalkan power yang dilakukan oleh setiap negara bertujuan untuk menjaga negaranya dari berbagai jenis ancaman yang berpotensi mengganggu kestabilan keamanan negara, baik yang bersifat tradisional maupun non tradisional. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada ancaman keamanan tradisional berupa perkembangan kapabilitas militer serta kepemilikan persenjataan konvensional maupun nuklir negara-negara di Asia Selatan. Berikut adalah penjelasan mengenai pembangunan kekuatan militer negara-negara di Asia Selatan dari tahun 2015 hingga 2017⁷² yang lebih difokuskan pada negara yang dianggap cenderung kuat dimensi pertahanannya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Selatan berpengaruh pada jumlah belanja pertahanan yang dikeluarkan oleh setiap negara tersebut.

Mengacu pada data revidi oleh NIDS tahun 2015, terjadi peningkatan pada dimensi perekonomian yang kemudian berpengaruh pada peningkatan pengeluaran belanja pertahanan negara-negara di Asia Selatan selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2014. Hal ini serupa dengan laporan *the Military Balance 2016* bahwa ada peningkatan jumlah belanja pertahanan pada beberapa negara di Asia Selatan pada tahun 2015 (Lihat Tabel 7).

⁷⁰ Hans J. Morgenthau, *Op. Cit.*, 80.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Paparan mengenai pembangunan kekuatan militer negara-negara di Asia Selatan (2014–2017) didasarkan pada data yang dipublikasi oleh *the National Institute for Defense Studies* (NIDS) dan *the International Institute for Strategic Studies* (IISS). NIDS merupakan badan penelitian kebijakan inti kementerian pertahanan yang melakukan penelitian dan studi dengan orientasi kebijakan, terutama pada sejarah keamanan dan militer. Lihat selengkapnya profil NIDS pada <www.nids.mod.go.jp>. Sedangkan, IISS merupakan lembaga yang menaungi tenaga ahli pada bidang kajian strategis yang melakukan penelitian berbasis fakta, mengadakan dan menggelar diskusi, dan menghasilkan publikasi termasuk *the Military Balance*, penilaian tahunan definitif mengenai kemampuan pertahanan, politik global dan jurnal strategi. Lihat selengkapnya profil IISS pada <www.iiss.org/about-us>.

Tabel 6. Belanja Pertahanan Negara-negara di Asia Selatan (US\$ miliar)

Negara	2014	2015	2016	2017
Afganistan	0.23	0.18	0.19	0.18
Bangladesh	2.61	2.95	3.25	3.45
India	50.91	51.40	56.64	59.77
Nepal	0.35	0.34	0.32	0.36
Pakistan	8.89	9.65	9.98	10.38
Sri Lanka	1.83	1.99	1.75	1.85

Sumber: Data bersumber dari Stockholm International Peace Research Institute, Military Expenditure Data (constant US\$ 2016) 2018, yang diakses melalui situs web SIPRI (<https://www.sipri.org/databases/milex>) pada 8 November 2018. Data untuk Bhutan dan Maladewa tidak tersedia.

Pada pertengahan tahun 2014, Pakistan mengumumkan bahwa ia akan meningkatkan anggaran belanja pertahanannya sebesar 11% pada tahun yang akan datang (2015).⁷³ Kemudian, jika diperhatikan data belanja pertahanan Pakistan tahun 2015, memang terjadi peningkatan belanja sebesar 8,5% dibandingkan pengeluaran belanja tahun sebelumnya. Maka, tidak menutup kemungkinan bahwa rencana peningkatan anggaran Pakistan pada tahun 2014 telah terealisasi pada tahun 2015.

Sedangkan pada tahun 2015, Sri Lanka berencana akan meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 12% yang akan dialokasikan untuk lembaga keamanan internal negara itu untuk tahun 2016.⁷⁴ Data pengeluaran belanja pertahanan Sri Lanka sejak 2014 hingga 2015 pun mengalami peningkatan sebesar 9%. Alhasil, Sri Lanka mengeluarkan US\$1,99 untuk belanja pertahanan negaranya di tahun 2015. Namun, terjadi penurunan jumlah pengeluaran belanja pertahanan Sri Lanka di tahun 2016, sekitar 12% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

⁷³ *The International Institute for Strategic Studies (IISS), the Military Balance 2016* (London: IISS), 2016. 215.

⁷⁴ *Ibid.*

Berbeda dengan dua negara sebelumnya, Bangladesh⁷⁵ cenderung lebih rendah dari segi rencana peningkatan anggaran belanja pertahanannya, yaitu sekitar 3,5%.⁷⁶ Akan tetapi, data menunjukkan bahwa juga terjadi peningkatan pada pengeluaran belanja pertahanannya pada tahun 2015 yang bahkan lebih besar nominalnya bila dibandingkan dengan Sri Lanka, yaitu sekitar 13%.

Masih merujuk pada the *Military Balance* 2016, dilaporkan bahwa Pakistan mengembangkan kekuatan nuklir dan senjata konvensional secara terstruktur, sebagai bentuk sikapnya atas ancaman dari negara rivalnya, yaitu India. Pada tahun 2013, Pakistan hanya mengumumkan percobaan peluncuran rudal Hatf IV yang merupakan reformasi dari jenis sebelumnya, sehingga mampu membawa hulu ledak nuklir dengan jangkauan penyerangan mencapai 60 km.⁷⁷ Kemudian, pada akhir tahun 2014, Pakistan juga telah melakukan uji coba Hatf IX dengan salvo-mode (tembakan serentak) untuk membuktikan kemampuan daya jangkau sejauh 60 km serta berfokus pada peningkatan kemampuan manuver penerbangan.⁷⁸

Meskipun hingga akhir tahun 2014 negaranya masih menghadapi permasalahan terorisme, tetapi Pakistan tetap memperhatikan kesiapan untuk menghadapi ancaman militer bagi negaranya. Alhasil, Pakistan melakukan pengadaan pesawat tempur JF-17 Thunder dari Tiongkok.⁷⁹ Begitu pun pada matra/angkatan laut yang dilaporkan sedang merencanakan pembelian 8 kapal selam diesel-listrik dari Tiongkok pada pertengahan tahun 2015.⁸⁰ Menjelang tahun 2015, Pakistan mengklarifikasi rencana penggunaan senjata nuklir jangkauan rendah atau taktis untuk menghalau ancaman potensial dari pasukan India yang berada di bawah doktrin Cold Start.⁸¹ Ghauri medium-range ballistic missile atau rudal balistik Ghauri (Haft V) dengan jangkauan

⁷⁵ Kebijakan luar negeri Bangladesh sangat dipengaruhi oleh tekanan yang terjadi di dalam kawasan Asia Selatan, terutama dari India dan Pakistan. Dengan demikian, persaingan antara India dan Pakistan bahkan lebih besar perannya dalam memengaruhi karakter kebijakan Bangladesh pasca-Perang Dingin bila dibandingkan dengan stabilitas politik dan ekonomi domestik Bangladesh sendiri. Bukan hanya itu, ketegangan yang terjadi di antara India dan Pakistan pun disebut telah memengaruhi kawasan Asia Selatan secara keseluruhan. Lihat selengkapnya Kathryn Jacques, *Bangladesh, India and Pakistan: International Relations and Regional Tensions in South Asia* (Australia: Palgrave Macmillan, 2000).

⁷⁶ *Op. Cit.*

⁷⁷ NIDS, *East Asian Strategic Review* 2015, the National Institute for Strategic Studies, Tokyo, 2015, 172.

⁷⁸ Diakses melalui situs web *the Diplomat.com* <<https://thediplomat.com/2015/10/pakistan-clarifies-conditions-for-tactical-nuclear-weapon-use-against-india/>> pada 21 November 2018.

⁷⁹ *The Military Balance*, *Op. Cit.*, 276.

⁸⁰ *Ibid.*, 216-217.

⁸¹ India, melalui pasukan Angkatan Darat-nya, menjalankan sebuah doktrin pro-aktif yang dinamakan *Cold Start Doctrine* (CSD) yang dibentuk guna memperoleh keuntungan konvensional India guna mencegah kemungkinan serangan balik dari Pakistan. Doktrin ini merupakan sebuah strategi India untuk memastikan relevansi kekuatan konvensional mereka, dengan ancaman yang diasumsikan

sedang merupakan salah satu rudal yang berhasil diluncurkan pada uji coba kesiapan operasional pasukan Angkatan Darat tahun 2015.⁸² Pada tahun 2014-2015 Pakistan diperkirakan memiliki sebanyak 100-120 hulu ledak nuklir.⁸³

Pakistan, melalui Angkatan Darat-nya, mengklaim bahwa kekuatan konvensional dan nuklirnya telah mampu menanggapi strategi agresif dari India tersebut. Anggapan ini diperkuat dengan jumlah kekuatan Pakistan pada tahun 2015. Pakistan tercatat memiliki total pasukan (matra darat, laut, dan udara) 653.800 personel dan 282.000 paramiliter.⁸⁴ Pakistan sendiri mengedepankan strategi militernya mengingat beberapa bagian wilayah yang penting bagi Pakistan terletak di perbatasan antara Pakistan dan India.⁸⁵

Menurut laporan NIDS tahun 2017, Pakistan, sebagai negara yang bersaing dengan India dalam dimensi militer, membuka jalan bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Samudera Hindia. Hal ini bertujuan agar Pakistan, yang merupakan sekutu dari Tiongkok, mampu mengimbangi kapabilitas militer serta pengaruh India di Asia Selatan. Strategi untuk mengimbangi India dilakukan melalui izin pembangunan pangkalan angkatan laut Tiongkok di wilayah Pakistan serta penandatanganan kontrak pembelian delapan unit kapal selam konvensional tipe 041 atau Yuan-Class Conventional Submarines pada tahun 2015.⁸⁶

Kemudian sejak akhir tahun 2015 hingga 2016, dengan memiliki sekitar 110-130 hulu ledak nuklir⁸⁷, Pakistan melakukan pengembangan sistem terbaru berupa rudal balistik jarak sedang, yaitu Ababeel, yang akhirnya diuji coba pada awal tahun 2017. Kembali lagi pada Tabel 7, terlihat bahwa jumlah pengeluaran belanja pertahanan Pakistan di Tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebanyak hampir 5% dari tahun 2016. Selanjutnya, pada pertengahan Juli 2017, Pakistan melakukan uji coba terbang rudal balistik Nasr (Hatf IX). Nasr sendiri merupakan senjata

akan terjadi. Doktrin ini pun sesungguhnya meningkatkan ketegangan relasi antara India dengan negara-negara di Asia Selatan lainnya, terutama Pakistan. Penerapan CSD oleh India sejak 2004 memunculkan ancaman dan tantangan baru bagi stabilitas keamanan kawasan Asia Selatan. Lihat selengkapnya Brigadier Azhar Iqbal Abbasi (seorang Tentara Angkatan Darat Pakistan), *Indian Cold Start Doctrine and an Indo-Pak Path to Peace* (Carlisle: Strategy Research Project International Fellow (SRPIF), 2017).

⁸² Diakses melalui situs web *the Diplomat.com* <<https://thediplomat.com/2015/10/pakistan-clarifies-conditions-for-tactical-nuclear-weapon-use-against-india/>> pada 21 November 2018.

⁸³ *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Year Book 2016, Armaments Disarmaments and International Security*, Stockholm, 2015, 502.

⁸⁴ Diolah dari *the Military Balance 2016*.

⁸⁵ Masood Ur Rehman Khattak, 2011, "Indian Military's Cold Start Doctrine: Capabilities, Limitations, and Possible Response from Pakistan". *South Asian Strategic Stability Institute (SASSI)*. Research Paper No. 32. 30.

⁸⁶ NIDS, *East Asian Strategic Review 2017, the National Institute for Strategic Studies*, Tokyo, 2017, 58.

⁸⁷ *Year Book 2016, Op. Cit.*, 647.

nuklir skala rendah (low-yield)⁸⁸ milik Pakistan yang tercatat telah dikembangkan sejak pertengahan tahun 2000-an. Baik Nasr ataupun Hatf IX ini diperkirakan mampu memuat sub-kiloton muatan nuklir.⁸⁹

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh perwakilan Pakistan's Inter-Services Public Relations (ISPR), percobaan peluncuran ini menandakan bahwa Nasr telah mencapai parameter teknis baru dengan jangkauan yang lebih luas (mencapai 60 hingga 70 km) dan kemampuan manuver yang lebih baik. Pada laporan yang sama dinyatakan bahwa parameter baru ini akan lebih efektif dengan adanya program pertahanan anti-rudal. Peningkatan program rudal balistik yang sedang gencar dilakukan oleh India yang juga yang sebenarnya meningkatkan kekhawatiran Pakistan akan pertahanan negaranya. Hal ini segaris dengan pernyataan yang tertulis pada *Country of Origin Information Report: Pakistan Security Situation* yang dipublikasi oleh European Asylum Support Office pada Agustus 2017 bahwa kekuatan konvensional dan nuklir Pakistan diorientasikan dan difokuskan pada ancaman dari India.⁹⁰

Sebagaimana yang tercatat pada SIPRI Fact Sheet 2018, Pakistan menyumbang 2,8% dari impor senjata global pada tahun 2014 hingga 2017, dengan Tiongkok sebagai pemasok terbesar. Namun, setelah terjadi penurunan impor senjata dari Tiongkok, Pakistan akhirnya menerima bantuan militer besar dari AS, berupa 28 pesawat tempur dan 5 pesawat patroli maritime. Kemudian Karena faktor kepentingan lain, AS mengurangi bantuan senjata bagi Pakistan pada periode tahun 2014 hingga 2017. Setidaknya turun 76% sejak periode 2008 hingga 2013.⁹¹ Dengan demikian, Pakistan bersikap dengan berencana untuk meningkatkan anggaran sebesar 11% untuk tahun 2017.⁹²

Sedangkan Bangladesh merealisasikan pengeluaran belanja pertahanan negaranya dengan mengoptimalkan kemampuan militer pada wilayah perbatasan dan keamanan domestik. Bangladesh memutuskan membeli kapal perang second-hand Italian Minerva & Chinese-Built masing-masing satu unit, dan dua unit kapal selam tipe-035G dari Tiongkok. Keempat unit

⁸⁸ Secara umum, terdapat tiga jenis senjata nuklir yaitu *short-range low-yield* atau biasa disebut 'tactical' nuclear weapons yang merupakan senjata nuklir dengan daya jangkau dan skala rendah, *medium-range* yang merupakan senjata nuklir dengan daya jangkau sedang, dan *long-range high-yield* atau biasa disebut 'strategic' nuclear weapons yang merupakan senjata nuklir dengan daya jangkau dan skala tinggi.

⁸⁹ Diakses melalui situs web the Diplomat.com <<https://thediplomat.com/2017/07/pakistan-tests-its-nasr-short-range-ballistic-missile-system-improving-range/>> pada 20 November 2018.

⁹⁰ *Country of Origin Information Report: Pakistan Security Situation*. European Asylum Support Office (EASO). 2017. 18.

⁹¹ *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Fact Sheet 2018, Trends in International Arms Transfer 2017*, Stockholm, 2018, 9.

⁹² *The International Institute for Strategic Studies (IISS), the Military Balance* (London: IISS), 2017. 246.

persenjataan angkatan laut ini dijadwalkan akan diterima oleh Bangladesh pada akhir tahun 2015.⁹³ Pada tahun 2016, menindaklanjuti pembelian kapal Italia pada akhir tahun sebelumnya, Bangladesh melakukan rekapitalisasi persenjataan pertahanan negaranya melalui pasukan angkatan laut khusus, yang memproduksi kapal patroli berkecepatan tinggi. Selain itu, Bangladesh juga melakukan pembelian dua kapal korvet layang-layang Swadhinota buatan Tiongkok pada bulan Maret 2016, serta menjadwalkan pembelian dua kapal selam tipe 035G yang juga dari Tiongkok pada awal tahun depan.⁹⁴

Afghanistan mengurangi belanja sebesar 19% menjadi US\$ 217 juta pada tahun 2015. Namun Afghanistan tetap menerima bantuan dana asing untuk peningkatan kapabilitas pertahanannya, termasuk \$ 4,1 miliar dari Amerika Serikat dan \$ 1,25 miliar dari negara lain pada tahun 2015.⁹⁵ Afghanistan tercatat merencanakan pembaruan armada serta pembelian *helicopter* MD 530F dan pesawat latih EMB-314 pada akhir tahun 2016.⁹⁶ Sebagian besar upaya peningkatan kapabilitas pertahanan yang dilakukan oleh Afghanistan oleh bantuan atau donor negara asing.⁹⁷ Pada tahun 2017, Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan meluncurkan 104 tugas Pasukan Khusus di berbagai bagian negara untuk menghapus ancaman keamanan dan memastikan keamanan. Operasi-operasi ini dilakukan oleh Pasukan Tentara Nasional Afghanistan dan dengan dukungan pasukan Angkatan Udara di provinsi Nangarhar, Laghman, Logar, Paktika, Ghazni, Kandahar, Oruzgan, Farah, Takhar, Balkh dan Helmand. Afghanistan fokus pada ancaman nontradisional.⁹⁸

Masih pada tahun yang sama, Afghanistan mendapat penilaian baru oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atas negaranya yang awalnya dinilai sebagai negara yang bertahan pasca konflik, menjadi negara yang sedang bertahan mencegah konflik intestitas rendah yang dulu terjadi, meningkat menjadi perang.⁹⁹ Kondisi keamanan negara yang tidak stabil menyebabkan Afghanistan semakin meningkatkan kapabilitas pertahanan negaranya. Maka pada tahun 2017, Afghanistan semakin gencar meningkatkan kapabilitas pertahanan agar ancaman dari dalam maupun luar negara bisa diminimalisir.

⁹³ *The Military Balance 2016, Op. Cit.*, 235.

⁹⁴ *The Military Balance 2017, Op. Cit.*, 274.

⁹⁵ *Year Book 2016, Op. Cit.*, 503.

⁹⁶ *The Military Balance 2016, Op. Cit.*, 231.

⁹⁷ *Year Book 2016, Op. Cit.*, 502-503.

⁹⁸ Berdasarkan *Press Release 2018* yang diakses melalui situs web *Ministry of Defense Islamic Republic of Afghanistan* <<http://mod.gov.af/en/blog>> pada 20 November 2018.

⁹⁹ *General Assembly Security Council, Special report on the strategic review of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan, 2017*, 3.

Di balik sikap saling mengimbangi antara Bangladesh dan Pakistan, Sri Lanka memegang peran penting bagi keduanya dalam penyebaran pengaruh di kawasan Asia Selatan sehingga disebut sebagai *sphere of influence*. Sri Lanka berupaya impor duabelas pesawat tempur JF-17, meskipun pada 2016 upaya tersebut gagal.¹⁰⁰ Jika India menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat, bagi Sri Lanka, dukungan militer datang dari Tiongkok. Sri Lanka dengan kapasitas untuk proyeksi kekuatan eksternal yang rendah, menyelenggarakan latihan keamanan maritim multinasional pada tahun 2017.¹⁰¹

Apabila dilihat dari beberapa laporan mengenai peningkatan anggaran pertahanan negara-negara di Asia Selatan yang telah dijelaskan sebelumnya, nampak beberapa negara lebih unggul anggaran belanja pertahanannya dibandingkan negara yang lain. Negara-negara yang terlihat aktif meningkatkan anggaran belanja pertahanannya adalah Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka. Penulis berargumen, peningkatan kapabilitas militer negara-negara di kawasan Asia Selatan dikarenakan rasa khawatir setiap negara atas potensi militer yang dimiliki oleh lain.

Hal ini yang kemudian mendorong negara-negara tersebut untuk saling meningkatkan kapabilitas militernya, mulai dari peningkatan anggaran belanja pertahanan hingga berbagai bentuk pengadaan senjata konvensional maupun non konvensional (nuklir). Dinamika persaingan yang ada di kawasan Asia Selatan, sebagai bagian dari lingkungan strategis India, tentu saja berdampak pada stabilitas keamanan India. Konsekuensinya, tidak dapat dipungkiri bahwa India, sebagai negara yang memiliki 'pengaruh' di kawasan Asia Selatan, akan merespons dinamika lingkungan strategisnya. Respons dari India itu, yang tentu terwujud dalam bentuk kebijakan pertahanan, akan dianalisis pada bagian selanjutnya.

3.3. Kebijakan Pertahanan India: Respons terhadap Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Selatan, 2014–2017

Bagian ini menganalisis respons India terhadap dinamika lingkungan strategis di Asia Selatan dari tahun 2014 hingga 2017. Setelah menjelaskan mengenai sikap aktif dari beberapa negara di Asia Selatan dalam meningkatkan kapabilitas pertahanannya masing-masing pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini penulis menelaah bagaimana India menanggapi perkembangan kapabilitas militer negara-negara yang berada di dalam kawasan Asia Selatan.

¹⁰⁰ *East Asian Strategic Review* 2017, *Op. Cit.*, 60.

¹⁰¹ *The International Institute for Strategic Studies (IISS), the Military Balance* (London: IISS), 2018. 300.

Lingkungan strategis India di Asia Selatan senantiasa mengalami perubahan yang disebabkan oleh dilema keamanan setiap negara atas potensi atau kekuatan militer negara lain. Artinya, setiap negara akan selalu merasa tidak cukup kuat atas *power* yang dimilikinya. Itu kemudian mendorong setiap negara berusaha mengimbangi kekuatan militer tersebut. Kondisi saling bersaing dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan negara ini menyebabkan dinamika persenjataan yang berdampak pada perubahan lingkungan strategis India. Sejalan dengan kondisi tersebut, terlihat bagaimana sikap/respons India melalui kebijakan pertahanan negara.¹⁰²

Kondisi lingkungan strategis India ditandai dengan adanya interaksi yang kompleks dan senantiasa berubah, baik di dalam kawasan/regional maupun global yang cakupannya lebih luas. Dimensi geo-strategis India menjadikannya harus berhadapan dengan tantangan berupa ketidakpastian dan ketidakstabilan hubungan dengan negara pada kawasan yang sama maupun pada lingkup global. Di samping keharusan mencapai nasional *interest*-nya, India juga harus berupaya menjaga kondisi negaranya agar tetap aman, sehingga pertumbuhan dalam negeri tidak terganggu dari bentuk ancaman konvensional maupun non konvensional.¹⁰³

Setiap negara tentu mengutamakan kepentingan nasionalnya, begitu pula dengan India. Kepentingan nasional menjadi salah satu alasan utama bagi India dalam mempertahankan keamanannya. Penulis berargumen bahwa India cenderung lebih responsif dan provokatif¹⁰⁴ dalam mempertahankan keamanan negaranya. Hal ini tergambar dari perkembangan kapabilitas pertahanan India yang bisa dibilang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sikap responsif yang ditunjukkan oleh India bisa didasari oleh faktor geografis, demografis, dan ekonominya.

¹⁰² Penelitian mengenai *defense policy* (kebijakan pertahanan) suatu negara lazimnya didasarkan pada *Defence White Paper* (Buku Putih Pertahanan). Namun, dalam hal ini, India tidak mempublikasi dokumen Strategi Keamanan Nasional ataupun Buku Putih Pertahanan negaranya ke publik secara luas. Dengan keterbatasan tersebut, penulis akhirnya menggunakan dokumen dari *Joint Doctrine for the Indian Armed Forces* (JDIAF). Doktrin bersama ini pertama kali dipublikasi pada bulan April 2017. Penulis berpendapat bahwa dokumen ini adalah literatur yang paling mendekati *Indian Defence White Paper* yang berisi pemaknaan atas elemen-elemen kekuatan bagi India, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Abhijnan Rej dan Shashank Joshi di dalam penelitiannya yang berjudul *India's Joint Doctrine: a Lost Opportunity* yang dipublikasi oleh *Observer Research Foundation* (ORF) pada Januari 2018.

¹⁰³ *Ministry of Defence Government of India, Annual Report 2014-2015*, 1-2.

¹⁰⁴ Menurut penulis, sikap India cenderung provokatif apabila dikaitkan dengan *military deployment*-nya. Pada tahun 2017, India membentuk *training teams* bagi tentara angkatan darat. India kemudian menempatkannya di Bangladesh dan Bhutan. Selain itu, India juga menempatkan 75% dari tentara teritorialnya di wilayah Jammu dan Kashmir sebagai bentuk pertahanan terhadap pemberontakan dan terorisme. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi Pakistan. Angkatan Laut India juga menempatkan armada kapalnya di wilayah Teluk Aden, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Maladewa, dan Sri Lanka. Lihat selengkapnya *Ministry of Defence (MoD) Government of India, Annual Report 2016-2017* (New Delhi: MoD, 2017)

India telah cukup baik dalam mengatur pasukan bersenjataanya meskipun sebenarnya ia bukan merupakan sebuah negara yang diatur berdasarkan *armed forces*. India juga merupakan negara yang pada dasarnya tidak termiliterisasi secara budaya dan sosial, tetapi terdapat sedikit kecenderungan oleh India dalam menggunakan kekuatan militer pada setiap instrumen kebijakan guna menghadapi potensi ancaman.¹⁰⁵ Modernisasi militer bukan hanya sekedar pembaruan teknologi, tetapi juga pembaruan strategi pengetahuan atas keamanan. Kebijakan pertahanan India bersifat reaktif dengan berbagai strategi yang bertujuan menjadi salah satu dari lima kekuatan besar di dunia.¹⁰⁶ Sebenarnya, peran aktif India di kawasan Asia Selatan mulai tergambar sejak tahun 1971 dengan orientasi politiknya yang telah bersifat global sebagai akibat dari interaksi India dengan banyak negara-negara bagian di dunia.¹⁰⁷ Sikap aktif tersebut terus semakin berkembang hingga saat ini.

Sebagaimana yang tertulis pada JDIF tahun 2017, terdapat beberapa tujuan keamanan nasional India antara lain: Mempertahankan kemampuan *deterrent* yang kredibel untuk melindungi kepentingan nasional; Memastikan pertahanan teritorial nasional, ruang udara, zona perairan, termasuk rute perdagangan dan ruang siber; Menjaga lingkungan internal yang aman dari ancaman terhadap persatuan dan pembangunan; Memperluas dan memperketat “keterlibatan konstruktif” dengan negara-negara lain untuk mempromosikan perdamaian regional, global dan stabilitas internasional.¹⁰⁸ Selanjutnya dikatakan juga bahwa pusat dari strategi keamanan nasional India ialah mempertahankan senjata pertahanan konvensional maupun nuklir yang efektif.¹⁰⁹ Sikap India dalam menjaga *national interest* dan *national security* yang mencakup keamanan wilayah, warga negara, serta sumber daya alam¹¹⁰ menjadi motif tersendiri bagi India dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan negaranya.

Berdasarkan pengamatan terhadap upaya saling mengimbangi yang terjadi di antara negara-negara di kawasan Asia Selatan, terlihat bahwa negara yang terlibat dalam spiral aksi-reaksi adalah India dan Pakistan. Hal ini didasari oleh pandangan dari keduanya yang mengganggu setiap tindakan yang dilakukan oleh satu sama lain sebagai bentuk ancaman.¹¹¹

¹⁰⁵ Stephen P. Cohen and Sunil Dasgupta, *Arming without Aiming* (Washington: Brookings Institution Press), 2010, 143.

¹⁰⁶ *Ibid.*, 145-146.

¹⁰⁷ Hafeez Malik “Dilemmas of National Security and Cooperation” di dalam Hafeez Malik, *Dilemmas of National Security and Cooperation in India and Pakistan* (London: St. Martin’s Press), 1993, 2.

¹⁰⁸ *Joint Doctrine Indian Armed Forces 2017, Chapter I ‘National Security’ Section II*, 3.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 4.

¹¹⁰ Lihat kembali data mengenai sumber daya mineral India (Tabel 6).

¹¹¹ Anggapan antara satu sama lain dapat dipengaruhi oleh sejarah perang di masa lalu yang terjadi antara India dan Pakistan. Pada tahun 1947, tepat setelah India dan Pakistan memperoleh

Sedangkan beberapa negara yang lainnya, seperti Bhutan dan Maladewa, cenderung pasif. Hal ini yang kemudian menunjukkan bahwa perimbangan kekuatan hanya terjadi di antara India dan Pakistan.

Apabila dinamika persenjataan yang terjadi antara India dan Pakistan dilihat melalui dimensi politik dan ekonomi, maka pandangan penulis sejalan dengan argumen dari Barry Buzan, bahwa hal tersebut (dinamika persenjataan) dapat tergambar melalui beberapa faktor, yaitu institusionalisasi penelitian militer, pengembangan, dan produksi; politik birokratis; pengelolaan ekonomi; dan politik domestik.¹¹² Hal ini kemudian segaris pula dengan apa yang tertulis pada *the Economic Survey 2017-2018* yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan India bahwa berinvestasi pada bidang ilmu pengetahuan atau penelitian adalah penting bagi keamanan India, baik untuk aspek keamanan wilayah, warga negara, lingkungan/iklim, maupun ruang siber.¹¹³ Investasi ini dapat diukur melalui Pengeluaran Bruto pada Penelitian dan Pengembangan atau *Gross Expenditure on Research and Development (GERD)*.

Dalam dua puluh tahun terakhir, anggaran penelitian militer atau *Research and Development (R&D)* India hanya bertahan di angka 0,6-0,7% dari total GDP per tahun.¹¹⁴ Meskipun demikian, bila ditinjau berdasarkan jumlah dalam Rupee, terus terjadi peningkatan dalam tiga

kemerdekaannya masing-masing, gesekan dalam relasi antara keduanya pun dimulai. Salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam bernama Kashmir menjadi penyebab retaknya hubungan India dan Pakistan. Keduanya berusaha memperebutkan wilayah Kashmir hingga melakukan perang bersenjata yang disebut dengan Perang Kashmir pertama. Perang Kashmir ini dikatakan sebagai akar perusuhan antara India dan Pakistan. Lihat selengkapnya Takenori Horimoto, *India's Wars: the Indo-Pakistani Wars and the India-China Border Conflict* (Jepang: *International Forum on War History*, 2015) Kemudian, pada tahun 1965, selama lima pekan, India dan Pakistan terlibat perang di sepanjang perbatasan timur Pakistan dari Kashmir ke arah Laut Arab. Selanjutnya, perang antara India dan Pakistan kembali terjadi pada tahun 1971 dengan melibatkan satu wilayah lain yang kemudian memisahkan diri dari Pakistan, menjadi Bangladesh, dengan dukungan India. Perang ini menjadi perang ketiga yang diawali oleh penyerangan pangkalan udara India dan deklarasi perang resmi oleh Pakistan kepada India. Pada tahun 1999, masih di wilayah yang sama, terjadi perang keempat antara India dan Pakistan di sepanjang 2 km wilayah Kashmir yang melibatkan kelompok pemberontak. Lihat selengkapnya Peter Lyon, *Conflict Between India and Pakistan: an Encyclopedia* (California: ABC-CLIO, 2008). Penulis tidak mendeskripsikan secara rinci mengenai kronologi perang yang terjadi antara India dan Pakistan karena pembahasan tersebut memerlukan satu penelitian tersendiri. Dengan sejarah perang sejak tahun 1947 hingga 1999, penulis memandang bahwa potensi terjadinya perang di masa depan antara kedua negara ini relatif tinggi. Maka, bentuk *deterrence* untuk meminimalkan terjadinya perang antara kedua negara ini pun diperlukan.

¹¹² Barry Buzan, *Op. Cit.*, 195.

¹¹³ *Ministry of Finance, Department of Economics Affairs. Economic Survey 2017-2018*. Januari 2018. 120.

¹¹⁴ Diakses dari situs web *The Economic Times* melalui

<<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/indias-rd-spend-stagnant-for-20-years-at-0-7-of-gdp/articleshow/62697271.cms>> pada 7 Desember 2018.

periode tahun, yaitu Rs240 juta (US\$3,4 juta) pada periode 2004-2005 menjadi Rs850 juta (US\$12 juta) pada periode 2014-2015, dan mencapai Rs1,4 miliar (US\$19 juta) pada periode 2016-2017.¹¹⁵ Dalam pandangan penulis, memang penting bagi India untuk memberi perhatian lebih pada anggaran R&D-nya karena penelitian yang dikhususkan pada bidang militer niscaya membantu kesiapan India dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di masa depan. Dengan demikian, India dapat lebih inovatif dan meningkatkan kapabilitas pertahanan negara, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas.

Argumen penulis, bentuk respons India untuk mengimbangi peningkatan kapabilitas pertahanan negara-negara di Asia Selatan yang merupakan lingkungan strategisnya lebih kepada pertahanan yang responsif. India cenderung bersikap agresif dalam meningkatkan pertahanan negaranya. Manakala terjadi sedikit saja peningkatan kapabilitas pertahanan yang dilakukan oleh negara-negara di sekitarnya, India berupaya melakukan hal yang sama dengan tingkat besaran yang jauh lebih tinggi.

3.3.1. Kebijakan India dalam Upaya Meningkatkan Postur Pertahanan

Postur pertahanan pada penelitian ini dimaknai sebagai *force posture* yang berarti “*numbers, types, locations, and other qualitative factors concerning a state’s military forces*”.¹¹⁶ Pada penelitian ini, penggunaan istilah postur pertahanan, kapabilitas pertahanan, dan kapabilitas militer saling dipertukarkan (*interchangeable*). Selain sebagai negara dengan wilayah terluas dan penduduk terbanyak di Asia Selatan, India juga merupakan negara dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) paling tinggi. Berikut adalah Tabel 8 yang memetakan perbandingan luas wilayah, jumlah populasi, serta PDB negara-negara di Asia Selatan berdasarkan data tahun 2017.

¹¹⁵ *Economic Survey, Ibid.* Data kemudian diolah melalui *India Units Conversion: Units of India Calculator* < <http://convert.szygy.in/>> pada 7 Desember 2018, dengan perhitungan Rs1 = US\$0,014. Peningkatan yang demikian terjadi karena jumlah GDP India pun mengalami peningkatan setiap tahunnya. (Lihat selengkapnya *World Bank Data for India’s GDP in constant 2010 US\$*) diakses melalui < <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=IN>> pada 7 Desember 2018. Pertumbuhan GDP yang cukup signifikan menjadi alasan bagi India untuk tergabung ke dalam G- 20.

¹¹⁶ Sebagaimana dikutip dari P.R. Viotti dan M.V. Kauppi, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity* (New Jersey: Pearson Prentice Hall), 2012, 309. Pada penelitian ini, penggunaan istilah postur pertahanan, kapabilitas pertahanan, dan kapabilitas militer saling dipertukarkan (*interchangeable*).

Tabel 7. Luas Wilayah, Populasi Penduduk, dan GDP Negara-negara di Asia Selatan

Tahun 2017

Negara	Luas (juta km ²)	Populasi (jiwa)	GDP (US\$ miliar)
Afganistan	0.66	34,124,811	21.1
Bangladesh	0.13	157,826,578	250.0
India	3.20	1,281,935,911	2260.0
Nepal	0.14	29,384,297	24.1
Pakistan	0.77	204,924,861	279.0
Srilanka	0.06	22,409,381	83.6

Sumber: Data bersumber dari the Military Balance 2018 dan the World Bank Data 2018. Data luas wilayah diakses melalui situs web the World Bank, Land Area (sq. km) <<https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2>>. Data jumlah GDP diakses melalui situs web the World Bank, GDP (constant 2010 US\$) <<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD>> pada 15 November 2018. Data untuk Bhutan dan Maladewa tidak tersedia.

Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa India merupakan negara dengan wilayah terluas di antara negara-negara lain di kawasan Asia Selatan. Total luas wilayah India berdasarkan data terkini adalah sekitar 3,2 juta km². Jumlah PDB India juga merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai US\$2,2 triliun. Pakistan menjadi negara kedua dengan wilayah terluas setelah India, yaitu 770.000 km². Selain itu, Pakistan juga merupakan negara dengan PDB terbesar setelah India, jika dibandingkan negara-negara lainnya, disusul oleh Afghanistan dengan luas wilayah 660.000 km²; Namun, PDB Afghanistan masih kalah bila dibandingkan dengan Bangladesh yang berada pada urutan ketiga yaitu sekitar US\$250 miliar.

Dari data yang tertera pada Tabel 8, negara yang terlihat mendominasi kawasan Asia Selatan berdasarkan luas wilayah, populasi dan pendapatan negaranya adalah India. Alhasil, India memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas keamanan wilayah dan jumlah populasinya yang tinggi tersebut.

Bila merujuk kepada pandangan Morgenthau di dalam bukunya, *Politics among Nations*, letak geografis merupakan salah satu elemen paling tetap yang dapat menentukan

kekuatan dari sebuah negara.¹¹⁷ Menurut pandangan penulis, India, yang secara geografis sebagian wilayahnya dikelilingi oleh wilayah perairan, perlu untuk menjaga pertahanan dan keamanan negaranya terutama wilayah maritim. Selain itu, dengan garis pantai sepanjang 7.500 km, 1.200 pulau, dan 2,4 juta km² zona ekonomi eksklusif,¹¹⁸ menuntut India untuk secara serius memperhatikan keamanan wilayah perairannya. Penulis berpandangan, wilayah perairan dapat menjadi pintu masuk segala jenis ancaman dari luar India sendiri. Maka, hubungan antara India dengan negara-negara di luar kawasan Asia Selatan juga perlu menjadi perhatian bagi India.

Selain letak geografis, masih merujuk pandangan Morgenthau, perekonomian juga menjadi salah satu elemen yang menentukan seberapa kuat suatu negara. Berdasarkan laporan NIDS dalam *East Asian Strategic Review 2015*, pertumbuhan ekonomi India cenderung meningkat sekitar 9,7% pertahun antara tahun fiskal 2004 hingga 2012, sejak Narendra Modi terpilih menjadi Perdana Menteri. Pemerintahan Modi menekankan kepada pencapaian kekuatan perekonomian India sehingga dapat bersaing dan berpengaruh dalam level internasional, meningkatkan keamanan internal dari sengketa perbatasan, serta reformasi pertahanan.¹¹⁹ Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, India pun meningkatkan pengeluaran belanja pertahanannya dari yang semula US\$16,3 miliar pada tahun fiskal 2003 hingga 2004 menjadi US\$47,4 miliar pada tahun fiskal 2013-2014. Jumlah impor senjata India juga terus meningkat sebesar 59% hingga tahun 2013, sehingga menjadikannya India sebagai negara importir dengan total 12% bagian dari impor senjata di dunia.¹²⁰

India, yang perekonomiannya semakin membaik sejak tahun 2014, terlihat unggul dalam jumlah belanja pertahanannya sejak tahun 2014 hingga 2017. Peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah belanja pertahanan India adalah pada tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu lebih dari US\$ 5 miliar.¹²¹

Pada awal tahun 2015, India menjadi negara pertama yang mengumumkan peningkatan anggaran belanja pertahanannya pada bulan Februari sebesar 7,7% (atau sekitar US\$ 38,2 miliar) dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari total anggaran pertahanannya, angkatan darat memiliki bagian terbesar dengan alokasi sebesar US\$20,3 juta, diikuti oleh angkatan udara dengan US\$8,8 juta, disusul angkatan laut dengan US\$6,3 juta. Maka, apabila

¹¹⁷ Morgenthau, *Politics among Nations* (Canada: The Ryerson), 1948, 80.

¹¹⁸ *Minister of State for Defence of India's speech in 14th Asia Security Summit, the IISS Shangri-La Dialogue 2015*.

¹¹⁹ *East Asian Strategic Review 2015, Op. Cit.*, 188.

¹²⁰ *East Asian Strategic Review 2015, Op. Cit.*, 189.

¹²¹ Lihat kembali Tabel 7.

dipersentasekan, dana yang dianggarkan pada angkatan darat, udara, dan laut secara berturut-turut ialah sebesar 79%, 41%, dan 38%.¹²²

Dalam lima tahun terakhir, dikatakan dalam laporan *Military Balance* 2016, India sangat aktif dalam aktivitas patroli wilayah perairan dan juga udara. Meskipun rencana untuk membeli pesawat tempur jenis Mirage 2000 dan Sukhoi Su-30 MKI mengalami penundaan; Namun, India tetap melakukan rencana pengadaan pesawat tempur generasi ke-4.5 dengan jenis *Daffault Rafale* sejumlah 36 unit.¹²³ Jumlah ini hanya sekitar seperempat dari rencana awal, yaitu sekitar 126 unit. Sebagai negara dengan angkatan bersenjata terbesar ketiga di dunia oleh kekuatan personel, India terus meningkatkan kemampuan militernya dari segala aspek pertahanan, misalnya angkatan udara yang berencana akan mengakuisisi pesawat tanker A330.¹²⁴

Sebagaimana yang tertulis di dalam *Indian Ministry of Defence's Annual Report* 2014-2015 yang dikutip oleh NIDS, secara historis India dikatakan sebagai negara maritim, yang keamanan serta kemakmurannya dipengaruhi oleh Samudera Hindia. India terlihat lebih fokus pada keamanan maritim, sehingga ia membentuk strategi keamanan maritim terbarunya pada tahun 2015 guna menjaga pertahanan wilayah maritim dari kemungkinan risiko ancaman. India juga menjadikan *net security* sebagai elemen utama dari strateginya untuk menciptakan lingkungan maritim yang bernilai positif. *Net security* sendiri dimaknai sebagai keadaan negara yang aman atas ancaman, risiko, dan tantangan wilayah perairan. Strategi ini dijalankan melalui lima aksi utama, yaitu respons cepat, keterlibatan langsung, peningkatan kapasitas dan kemampuan, pengembangan *Maritime Domain Awareness* (MDA) kawasan, dan operasi keamanan maritim.¹²⁵ Peningkatan kapabilitas militer India dalam bidang maritim tergambar pula dari sikapnya mendirikan pangkalan udara angkatan laut ketiga di Andaman dan Nicobar sebagai jendela menuju Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 2015.¹²⁶

Anggaran pertahanan India lagi-lagi meningkat sebesar 14% menjelang tahun 2016, sehingga ia kembali berada di atas jumlah yang dianggarkan oleh Pakistan.¹²⁷ Tahun 2016 juga menjadi awal mula kebijakan pertahanan berupa kerja sama yang diterapkan oleh India bersama Bangladesh, Maladewa, dan Sri Lanka. Kerja sama dalam bidang pertahanan yang dilakukan oleh India adalah berupa penjagaan pantai melalui angkatan laut. Selanjutnya, fokus

¹²² *The Military Balance* 2016, Op. Cit., 228.

¹²³ *The Military Balance* 2016, Op. Cit., 216.

¹²⁴ *The Military Balance* 2016, Op. Cit., 250.

¹²⁵ *East Asian Strategic Review* 2017, Op. Cit., 44.

¹²⁶ *The Military Balance* 2016, Op. Cit., 235.

¹²⁷ *The Military Balance* 2017, Op. Cit., 246.

India pada bidang maritim tahun 2015 lalu, tergambar kembali pada tahun 2016, saat dua pesawat patrol maritim jarak jauh, yaitu Boeing P-81, tercatat berpatroli di wilayah perairan India selama dua minggu.¹²⁸

India lalu memperluas perhatiannya pada angkatan udara, seperti yang tertulis dalam laporan *the Military Balance* 2017, rencana India untuk melakukan pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis merupakan satu dari beberapa rencana rekapitalisasi armada tempur. Namun, rencana yang akhirnya ditandatangani pada akhir tahun 2016 ini kembali gagal dikarenakan proses negosiasi yang rumit serta rencana produksi pesawat tempur yang sama oleh produsen dalam negeri India sendiri. India kembali merencanakan program pengadaan 42 skuadron tempur bagi armada angkatan udaranya hingga tahun 2027, sekaligus pembaruan pesawat jenis MiG-21 Fishbed, MiG-27 Flogger, dan Jaguar dengan F-16 atau F/A-18.¹²⁹

Kemudian, pada tahun 2017, PDB India tumbuh sebesar 6,7%, lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi antara tahun 2015 dan 2016 yaitu sekitar 7,1%. Alhasil, India berupaya meningkatkan PDB-nya sebesar 7,4% pada tahun 2018.¹³⁰ Bila dilihat dari anggaran pertahanannya, setelah melakukan peningkatan 7,7% di awal tahun 2015 lalu, India kembali meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 4,3% pada tahun 2017. Alokasi terbesar dari anggaran tersebut adalah untuk biaya personel, mengingat jumlah personel angkatan darat India yang cenderung meningkat dalam periode 2014 hingga 2017.¹³¹

Sejalan dengan berbagai bentuk peningkatan kapabilitas pertahanan India yang telah diuraikan sebelumnya, Nirmala Sitharaman, Menteri Pertahanan India yang menjabat pada tahun 2017, menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas bagi India pada tahun 2017. Pertama, kesiapan pasukan bersejata baik angkatan darat, angkatan udara, maupun angkatan laut, dalam menghadapi bentuk ancaman eksternal. Kedua, kesiapan India dalam memproduksi alat utama sistem pertahanan sendiri melalui produsen dalam negeri. Ketiga, menjamin kesejahteraan keluarga para pasukan angkatan darat, angkatan udara, serta angkatan laut.¹³² Pada tahun yang sama, India juga menyepakati doktrin angkatan bersenjata

¹²⁸ *East Asian Strategic Review* 2017, *Op. Cit.*, 51-52.

¹²⁹ *The Military Balance* 2017, *Op. Cit.*, 240.

¹³⁰ *The Military Balance* 2018, *Op. Cit.*, 222.

¹³¹ *The Military Balance* 2018, *Op. Cit.*, 223.

¹³² Dikutip dari potongan pidato pertama yang diberikan oleh Nirmala Sitharaman pada hari pertama penugasan dirinya sebagai Menteri Pertahanan India pada tahun 2017. Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=6pbsxoposGk> pada 15 November 2018.

bersama dengan Amerika Serikat dalam hal nuklir, untuk melengkapi senjata konvensional angkatan darat, laut, dan udara.¹³³

Berbeda dengan kondisi pada tahun sebelumnya (2016), pada tahun 2017 hubungan antara India dan negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah India, yaitu Pakistan dan Tiongkok, semakin tegang.¹³⁴ Hal tersebut pun memengaruhi India untuk kembali membentuk kebijakan baru demi mempertahankan keamanan wilayahnya, seperti memperluas pengawasan terhadap garis pantai melalui angkatan udara dan laut. Upaya India dalam menjaga pertahanan negaranya sebagai respons terhadap dinamika lingkungan strategis di Asia Selatan selama tahun 2014 hingga 2017 penulis petakan ke dalam Tabel 9.

Tabel 8. Upaya India dalam Peningkatan Kapabilitas Pertahanan Tahun 2014–2017

Tahun	Upaya melalui kebijakan	
	Internal	Eksternal
2014	<p>Peningkatan Pengeluaran Pertahanan sebesar US\$ 490 juta lebih banyak dari total pengeluaran tahun 2013.</p> <p>Peningkatan jumlah personel pasukan Angkatan Darat.</p>	-

¹³³ *The Military Balance 2018, Op. Cit.*, 260.

¹³⁴ *Strategic Survey: the Annual Assessment of Geopolitics* (London: IISS), 2017, 118.

Tahun	Upaya melalui kebijakan	
	Internal	Eksternal
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Anggaran Pertahanan sebesar US\$38,2 miliar yang dialokasikan sebesar US\$20,3 miliar kepada Angkatan Darat, US\$8,8 miliar kepada Angkatan Udara, dan US\$6,3 miliar kepada Angkatan Laut. • Rencana pengadaan pesawat tempur Mirage Mi-2000 dan Sukhoi Su-30 MKI. • Rencana pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale sebanyak 126 unit. • Menerapkan Strategi Keamanan Net Security. • Peningkatan jumlah personel pasukan Angkatan Darat. 	Mengakuisisi pesawat tanker A330.
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Anggaran Pertahanan sebesar 14%. • Peningkatan Pengeluaran Pertahanan sebesar US\$5 miliar lebih banyak dari tahun sebelumnya. • Pengadaan 36 unit pesawat tempur Dassault Rafale. • Pengoperasian pesawat patrol maritim jarak jauh, Boeing P-81 di sepanjang garis pantai. • Rencana pengadaan 42 skuadron tempur armada Angkatan Udara. • Pembaruan pesawat MiG-21 Fishbed, MiG-27 Flogger, dan Jaguar dengan F-16 atau F/A-18. • Peningkatan jumlah personel pasukan Angkatan Darat. 	Kerja sama pertahanan penjagaan pantai dengan Bangladesh, Maladewa, dan Sri Lanka.

Tahun	Upaya melalui kebijakan	
	Internal	Eksternal
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Anggaran Pertahanan sebesar 4,3% yang dialokasikan kepada personel pasukan. • Peningkatan jumlah personel pasukan Angkatan Darat. • Rencana peningkatan kesiapan pasukan bersenjata. • Rencana produksi persenjataan melalui produsen dalam negeri. • Rencana peningkatan kesejahteraan keluarga pasukan bersenjata. 	-

Data bersumber dari, Stockholm International Peace Research Institute, Military Expenditure Data (constant US\$ 2016) 2018, yang diakses melalui situs web SIPRI (<https://www.sipri.org/databases/milex>) pada 8 November 2018; The International Institute for Strategic Studies (IISS), the Military Balance, (London: IISS), 2016-2018; NIDS, East Asian Strategic Review 2017, the National Institute for Strategic Studies, Tokyo, 2017; dan Pidato Menteri Pertahanan India, Nirmala Sitharaman.

Tercatatnya India sebagai salah satu negara importir terbesar pada tahun 2013, serta peningkatan jumlah pengeluaran belanja pertahanan yang dialami oleh India sejak 2013 hingga 2014¹³⁵, justru mengundang respons dari rivalnya, yaitu Pakistan. Pada tahun yang sama, Pakistan kemudian melakukan program peluncuran rudal yang merupakan jenis terbaru dengan daya jangkau 6 km serta mampu membawa hulu ledak nuklir.¹³⁶ Hubungan aksi-reaksi yang terjadi antara India dan Pakistan pun mulai tergambar. Melihat aksi yang dilakukan oleh Pakistan, hanya selang satu tahun kemudian, India mengambil sikap dengan tetap meningkatkan anggaran pertahanan negaranya, dengan besaran yang jauh di atas Pakistan.

Peningkatan anggaran pertahanan bukan hanya dilakukan oleh Pakistan, tetapi beberapa negara lainnya, yaitu Afghanistan, Bangladesh, dan Sri Lanka juga melakukan hal

¹³⁵ *East Asian Strategic Review* 2015, Op. Cit., 189.

¹³⁶ *Ibid.*, 172.

yang sama. Namun, peningkatan anggaran pertahanan beberapa negara tersebut sama sekali tidak berdampak pada persepsi ancaman oleh India. Hal ini disebabkan magnitude dari peningkatan anggaran pertahanan negara-negara tersebut masih berada jauh di bawah India.

Kemudian, ketika pada pertengahan tahun 2015, dilaporkan bahwa Pakistan berupaya mengembangkan senjata nuklir secara terstruktur serta merencanakan pengadaan kapal selam dan pesawat tempur,¹³⁷ India mengambil sikap dengan juga merencanakan pengadaan pesawat tempur sebanyak 126 unit, serta dilaporkan memiliki senjata nuklir mencapai 120 hulu ledak.¹³⁸ Penulis menilai bahwa sikap yang dilakukan oleh India ini merupakan bentuk reaksi atas aksi Pakistan; sebab, pada tahun sebelumnya, belum pernah ada rencana serupa. Sedangkan mengenai jumlah personel pasukan angkatan darat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Argumen penulis ialah bahwa India telah mencoba memperkuat pertahanan teritorialnya disebabkan oleh banyaknya sengketa wilayah yang berujung konflik bersenjata antara India dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengannya.

Keputusan India untuk menerapkan strategi *net security* pada tahun 2015 menjadi jalan bagi India untuk merespons kerja sama Pakistan-Tiongkok pada tahun 2016. Maka, India menjalin kerja sama dengan negara-negara yang juga berbatasan dengan India dengan tujuan untuk menghalau pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Selatan.

Wilayah yang sangat menjadi perhatian bagi India pada saat itu adalah perairan. Itulah sebabnya India mengoperasikan Boeing P-81 untuk berpatroli di sepanjang garis pantai India. Mengenai rencana peningkatan kesiapan pasukan bersenjata, produksi persenjataan dalam negeri, serta kesejahteraan keluarga pasukan tempur, masih dalam proses pelaksanaan. Dengan demikian, penulis belum mampu menuliskan bagaimana hasil akhir dari rencana tersebut.

Jika diperhatikan, setiap tahun pasti terjadi peningkatan belanja pertahanan. Demikian juga dengan jumlah personel angkatan darat. Hingga tahun 2017, India seolah mengedepankan jumlah pasukan angkatan daratnya. Namun, bukan berarti India tidak memperhatikan angkatan laut dan angkatan udaranya; buktinya, India selalu mengalokasikan anggaran, mengoperasikan strategis tertentu, serta pengadaan alat utama persenjataan untuk setiap pasukan tempur sejak 2014 hingga 2017.

Demikianlah paparan mengenai sikap India dalam merespons dinamika yang ada di lingkungan strategisnya dari tahun 2014 hingga 2017. Yang menjadi menarik kemudian adalah

¹³⁷ *The Military Balance 2016, Op. Cit.*, 276.

¹³⁸ *Ibid.*, 15.

apakah India pada akhirnya mampu mengimbangi dinamika lingkungan strategisnya tersebut atau justru tertinggal dari negara-negara lain di kawasan Asia Selatan. Oleh karena itu, selanjutnya akan diperlihatkan perbandingan postur pertahanan setiap negara yang ada di Asia Selatan. Perbandingan postur pertahanan yang dimaksud akan berupa perbandingan jumlah pasukan, jumlah persenjataan angkatan darat, jumlah persenjataan angkatan laut, serta jumlah persenjataan angkatan udara dalam kurun waktu 2014–2017. Setelah itu, akan diberikan kembali gambaran belanja pertahanan setiap negara di Asia Selatan dalam bentuk grafik agar dapat tergambar bagaimana posisi India di dalam dinamika lingkungan strategisnya.

3.4. Perbandingan Postur Pertahanan Negara-negara Asia Selatan, 2014–2017

3.4.1. Jumlah Pasukan Bersenjata

Jika diperhatikan, terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah pasukan militer aktif pada negara-negara di Asia Selatan. Pada Tabel 10 berikut ini, penulis membandingkan perbedaan jumlah pasukan bersenjata (angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara) negara-negara di Asia Selatan pada tahun 2017.

Tabel 9. Perimbangan Pasukan Bersenjata Negara-negara Asia Selatan Tahun 2017

Negara	AD	AL	AU	Total Pasukan	Paramiliter	Cadangan
Afganistan	167.000	-	7.300	174.300	148.000	-
Bangladesh	126.150	16.900	14.000	157.050	63.900	-
India	1.200.000	58.350	127.200	1.395.100	1.585.950	1.155.000
Nepal	96.600	-	-	96.600	62.000	-
Pakistan	560.000	23.800	70.000	653.800	282.000	-
Srilanka	200.000	15.000	28.000	243.000	62.200	5.500

Sumber: Diolah dari data *The International Institute for Strategic Studies (IISS), the Military Balance* (London: IISS), 2018. Data Bhutan dan Maladewa tidak tersedia.

Berdasarkan perbandingan dalam Tabel 10, India terlihat memiliki jumlah pasukan bersenjata paling banyak dibanding negara lainnya, dengan total pasukan aktif sebanyak 1,3 juta orang. Disusul oleh Pakistan yang jumlah total pasukan bersenjata hanya kurang lebih setengah dari total pasukan aktif India, yaitu 653.800 orang. Sri Lanka dengan total pasukan bersenjata 243.000 orang masih berada di atas jumlah Afghanistan dan Bangladesh. Jumlah pasukan kedua negara ini hanya memiliki sedikit selisih, yaitu Afghanistan sebanyak 174.300 dan Bangladesh pada urutan terakhir dengan total pasukan 157.050 orang personel.

3.4.2. Jumlah Persenjataan

3.4.2.1. Angkatan Darat

Postur pertahanan negara juga dapat dilihat melalui jumlah persenjataan yang dilimiki. Tabel 11 memetakan jumlah persenjataan 53ngkatan darat sebagai gambaran kapabilitas militer negara-negara di Asia Selatan.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa negara dengan jumlah persenjataan ACV terbanyak adalah India, yaitu 2.946 unit. Pakistan, dengan jumlah ACV 1.605 unit, menjadi negara yang berada pada posisi kedua. Dalam hal jumlah artillery, India dan Pakistan masih memimpin. Meskipun jumlah artillery Pakistan hanya sekitar 53ngkatan dari yang dimiliki oleh India. Sedangkan Afghanistan, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka dapat dikatakan tidak terlalu kuat dalam segi pertahanan 53ngkatan darat.

Tabel 10. Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Darat Negara-negara di Asia Selatan
Tahun 2017

Negara	MBT	LT	AIFV	APC	Recce	ACV*	Artillery
Afganistan	20	0	0	996	0	996	775
Bangladesh	276	8	0	476	8+	492+	853+
India	3,097+	0	0	336+	110	2,946+	9,684+
Nepal	0	0	0	253	40	293	92+
Pakistan	2,467+	0	0	1,605	0	1,605	4,472+
Srilanka	62	0	62	211+	15	288+	908

(Sumber: IISS) Diolah dari data *The International Institute for Strategic Studies (IISS), the Military Balance*, (London: IISS), 2018. Data Bhutan dan Maladewa tidak tersedia. Ket: MBT (*Main Battle Tank*), LT (*Light Tank*), AIFV (*Armored Infantry Fighting Vehicle*), APC (*Armored Personnel Carrier*), Recce (*Reconnaissance*), dan ACV (*Air Cushion Vehicle*). * ACV = AIFV + APC + Recce.

3.4.2.2. Angkatan Laut

Kapabilitas pertahanan negara-negara di kawasan Asia Selatan juga dapat dilihat melalui jumlah persenjataan angkatan laut. Mengingat, sebagian wilayah kawasan ini dikelilingi oleh perairan, sehingga penulis beranggapan bahwa kekuatan Angkatan Laut menjadi hal yang penting. Tabel 12 memperlihatkan jumlah persenjataan angkatan laut negara-negara di Asia Selatan. Berdasarkan tabel tersebut, India merupakan negara dengan jumlah kapal selam terbanyak, yaitu 14 unit, disusul oleh Pakistan dan Bangladesh dengan masing-masing 8 dan 2 unit. Sedangkan Afghanistan, Nepal, dan Sri Lanka tercatat tidak memiliki kapal selam pada tahun 2017. Namun demikian, Sri Lanka merupakan negara dengan kapal patroli pesisir pantai terbanyak, yaitu 132 unit, disusul India dengan 108 unit.

Tabel 11. Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Laut Negara-negara di Asia Selatan Tahun 2017

Negara	Submarines	Principal Surface Combatant	Patrol & Coastal Combatans	Amphibious	Logistic & Support
Afganistan	0	0	0	0	0
Bangladesh	2	5	50	15	9
India	14	28	108	19	31
Nepal	0	0	0	0	0
Pakistan	8	10	17	8	9
Srilanka	0	0	132	9	2

Sumber: Diolah dari the Military Balance 2018.

3.4.2.3. Angkatan Udara

Alat dukung pertahanan angkatan udara yang dimiliki oleh Sri Lanka merupakan yang paling sedikit (Lihat Tabel 13). Kendati selisih kepemilikan *aircraft combat* Afghanistan (19 unit) dan Bangladesh (84 unit) cukup tinggi, tetapi jumlah *aircraft combat* milik India jauh lebih dari itu, yaitu 849 unit. Pakistan dengan 425 unit *aircraft combat*-nya kembali kalah jumlah dalam hal alat persenjataan angkatan udara dibanding India. Afghanistan memiliki jumlah *helicopter* lebih banyak (110 unit) daripada Bangladesh (31 unit) dan Sri Lanka (72 unit). India dan Pakistan masih bersaing di jumlah 462 (India) dan 211 (Pakistan). Sedangkan Nepal terlihat tidak memiliki *aircraft combat* maupun *helicopter* karena tidak terdapat angkatan udara pada dimensi pertahanan Nepal.

Tabel 12. Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Udara Negara-negara di Asia Selatan Tahun 2017

Negara	Aircraft Combat	Helicopter
Afganistan	19	110
Bangladesh	84	31
India	849	462+
Nepal	0	0
Pakistan	425	211+
Srilanka	30	72+

Sumber: Diolah dari the Military Balance 2018.

3.4.2.4. Senjata Nuklir

Jika diperhatikan melalui kepemilikan senjata non konvensional (nuklir), hanya ada dua negara di kawasan Asia Selatan yang tercatat memiliki senjata nuklir sebagai salah satu alat pertahanan negara, lebih spesifik untuk kepentingan *deterrence* (penggentaran) bagi negara

lain. Sebab, hingga kini nuklir adalah satu-satunya senjata yang daya rusaknya massif dan membuat berbagai negara di dunia takut untuk menyerang lebih dulu. Dua negara tersebut adalah India dan Pakistan. Tabel 14 memetakan jumlah kepemilikan senjata nuklir India dan Pakistan sejak tahun 2014 hingga 2018.

Tabel 13. Perimbangan Kekuatan Nuklir Negara-negara di Asia Selatan Tahun 2014–2018

Negara	2014	2015	2016	2017	2018
India	90-110	120	130	130	130-140
Pakistan	100-120	130	130-140	140	140-150

Sumber: Data dihimpun dari *Stockholm International Peace Research Institute, Year Book 2015 & 2016*, yang diakses melalui situs web SIPRI (<https://www.sipriyearbook.org/view>) pada 20 November 2018, serta *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Fact Sheet 2016 & 2017, Trends in World Nuclear Forces 2016 & 2017*, Stockholm, 2.

Berdasarkan Tabel 14 terlihat bahwa Pakistan memiliki jumlah senjata nuklir yang relatif lebih banyak dari pada India sejak tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014, Pakistan dikawal oleh sekitar 100 hingga 120 hulu ledak nuklir, sementara India hanya mencapai 90-110 hulu ledak. Begitupun pada beberapa tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2015, India masih berada di bawah Pakistan dalam jumlah kepemilikan hulu ledak nuklir, yaitu 120; sedangkan Pakistan telah memiliki 130 hulu ledak nuklir. Namun, selanjutnya, sejak tahun 2016 hingga 2018, India dan Pakistan cenderung stabil jumlah senjata nuklirnya di angka 130-140 hulu ledak.

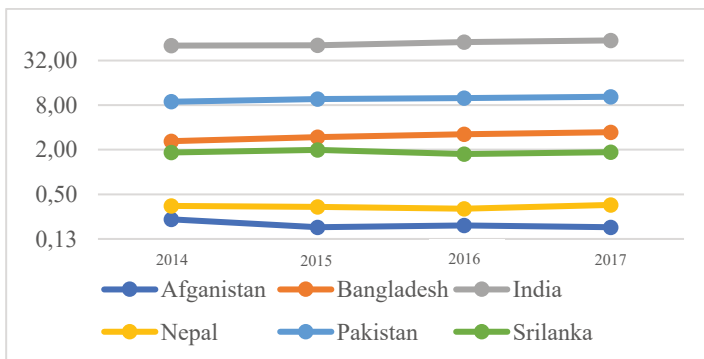
Keteringgalan India dalam jumlah hulu ledak nuklir bukan berarti kekuatan non konvensional India berada di bawah Pakistan. Senjata nuklir India diyakini berbasis plutonium yang dikembangkan sendiri oleh India melalui *the Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR)* di Tamil Nadu, India. India pun disebut-sebut tengah memperkaya uranium melalui *Ratthalli Rare Materials Plant (RMP)* di Karnataka guna menghasilkan bahan bakar bagi reaktor angkatan laut.¹³⁹ Dengan begitu, penulis beranggapan bahwa India masih lebih unggul

¹³⁹ *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Year Book 2016, Armaments Disarmaments and International Security*, Stockholm, 2015, 496.

dari segi kekuatan non konvensional karena kualitas dari senjata nuklir yang dimiliki oleh India.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai perimbangan kekuatan serta kapabilitas pertahanan negara-negara di kawasan Asia Selatan dalam rentang tahun 2014 hingga 2017, maka terlihat bahwa hampir seluruh negara di Asia Selatan memacu peningkatan di bidang pertahanan negaranya. Peningkatan kekuatan pertahanan dilakukan pada semua bidang pertahanan. Penambahan jumlah personel tempur pada setiap matra (darat, laut, dan udara) serta pengadaan jenis persenjataan yang mendukung segi pertahanan negara dari semua matra tersebut sangat berpengaruh pula bagi jumlah pengeluaran belanja pertahanan negara.

Untuk mendukung upaya penguatan kapabilitas pertahanannya, terlihat bahwa hampir seluruh negara di Asia Selatan meningkatkan alokasi anggaran negaranya ke bidang pertahanan. Berikut akan diberikan grafik yang menunjukkan posisi negara dengan peningkatan jumlah pengeluaran belanja pertahanan tertinggi di antara negara-negara di Asia Selatan pada tahun 2017 dalam miliar US\$ dan persentase terhadap GDP.



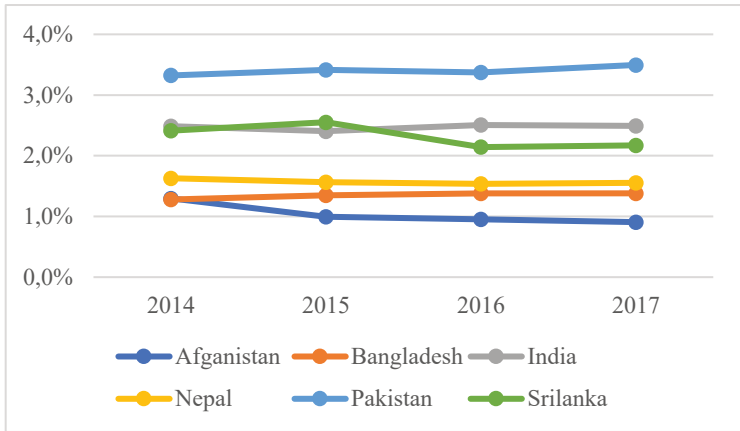
Grafik 1. Belanja Pertahanan Negara-negara di Asia Selatan Tahun 2017 (US\$ miliar)

Sumber: Stockholm International Peace Research Institute, Military Expenditure Data (constant US\$ 2016) 2018, yang diakses melalui situs web SIPRI (<https://www.sipri.org/databases/milex>) pada 8 November 2018. Data untuk Bhutan dan Maladewa tidak tersedia.

Apabila dicermati, Grafik 1 yang memberikan data perubahan jumlah belanja pertahanan sejak 2014 hingga 2017 di bawah menunjukkan bahwa India merupakan negara dengan jumlah belanja pertahanan tertinggi di Asia Selatan. Pada tahun 2017, jumlah belanja pertahanan yang dikeluarkan oleh India adalah sebesar US\$59,77 miliar. Pada tahun yang sama, Pakistan menyisihkan dana pada anggaran belanja pertahanan negaranya senilai US\$10,38 miliar. Alhasil, Pakistan menjadi negara di posisi kedua berdasarkan jumlah pengeluaran belanja pertahanannya disusul oleh Bangladesh (US\$3,45miliar), Nepal (US\$0,36 miliar), dan Afghanistan (US\$0,18 miliar).

Meskipun dari penjelasan grafik sebelumnya telah tergambar posisi negara dengan upaya terkuat (bila dilihat dari jumlah belanja pertahanannya), tetapi satu hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah besaran dari pendapatan negara itu sendiri. GDP setiap negara yang berbeda akan berpengaruh pada perbedaan jumlah belanja yang dikeluarkan oleh setiap negara. Jumlah belanja pertahanan sebenarnya dipengaruhi pula oleh kemampuan dari negara untuk mengalokasikan dana negara dengan porsi yang tepat (Grafik 2 yang menggambarkan seberapa besar persentase belanja pertahanan terhadap GDP negara).

Jika diperhatikan grafik di bawah, persentase belanja pertahanan negara-negara di Asia Selatan cenderung stabil sejak tahun 2014 hingga 2017. Terlihat bahwa Pakistan adalah negara yang paling besar persentase anggaran belanja pertahanannya di antara negara Asia Selatan lainnya. Persentase belanja pertahanan terhadap GDP Pakistan cenderung meningkat sejak 2014, meskipun terjadi penurunan pada 2016; namun kembali meningkat sebesar 3,5% pada 2017. India, Nepal, dan Bangladesh berada pada persentase yang sangat stabil hingga 2017. Meskipun demikian, India lebih besar persentase belanja pertahanannya (2,5%), disusul oleh Nepal (1,6%) dan Bangladesh (1,4%). Sedangkan Sri Lanka yang cenderung melemah persentase belanja pertahanan terhadap GDP-nya (2,2%) masih lebih baik dibandingkan Afghanistan juga melemah persentasenya hingga berakhir pada 0,9% di tahun 2017.



Grafik 2. Belanja Pertahanan Negara-negara di Asia Selatan (Menurut persentase terhadap GDP)

Sumber: Data bersumber dari *Stockholm International Peace Research Institute, Military Expenditure Data (% of GDP) 2018*, yang diakses melalui situs web SIPRI (<https://www.sipri.org/databases/milex>) pada 8 November 2018. Data untuk Bhutan dan Maladewa tidak tersedia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, India tidak menjalin *alliance* (aliansi)¹⁴⁰ dengan negara manapun di dalam maupun di luar kawasan Asia Selatan dalam periode 2014–2017. Namun, India cenderung menjalin kerja sama dalam bentuk *military cooperation* (kerja sama militer) dengan beberapa aktor di luar kawasan, terutama AS.¹⁴¹ Kerja sama militer strategis yang dilakukan oleh India ini merupakan reaksi atas hubungan Pakistan dan Tiongkok.

¹⁴⁰ Dalam konteks ini, penulis membedakan konsep *alliance* (aliansi) dan *military cooperation* (kerja sama militer). Menurut Williams, seorang Associate Professor pada the *Elliot School of International Affairs*, George Washington University, AS, “*What has traditionally distinguished alliances from many other security arrangements between states, however, is the emphasis that they place on military forms of assistance, especially the use of force*”. Dengan kata lain, yang membedakan antara aliansi dengan bentuk pengaturan keamanan lainnya seperti kerja sama militer, adalah pada penggunaan kekuatan militer. Lihat selengkapnya John S. Duffield “*Alliance*” di dalam Paul D. Williams, *Security Studies: an Introduction*. 2nd Edition (London: Routledge), 2013, 341.

¹⁴¹ Rincian soal kerja sama pertahanan antara India dengan negara-negara lain di luar kawasan, lihat Lampiran “*List of Military or Defence Agreement Signed with Foreign Countries for Last Three Years (from 1st August 2014 to 8th August 2017)*”.

Penulis berpendapat, kerja sama yang terjalin antara India dan AS merupakan salah satu strategi AS guna mencegah semakin meluasnya pengaruh Tiongkok di kawasan Asia- Pasifik umumnya dan Asia Selatan khususnya. Sedangkan, apabila diamati kembali, beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada 2014–2017, India dan Pakistan, sebagai dua negara yang mendominasi Asia Selatan, terlihat menjalin kerja sama dengan negara-negara di luar kawasan. Hal ini kemudian semakin mendorong kedua negara membangun kondisi *balance of power* di tingkat regional.¹⁴²

Bila memperhatikan data mengenai kerja sama India dengan negara-negara di luar kawasan Asia Selatan (lihat Lampiran), penulis berpandangan bahwa sikap India dalam meningkatkan kapabilitas pertahanannya bukan hanya didorong oleh kepentingan nasional serta persepsi ancaman dari negara-negara di kawasan Asia Selatan (utamanya Pakistan), tetapi juga dimotivasi oleh berbagai bentuk kepentingan negara-negara di luar kawasan Asia Selatan, utamanya AS. Pada kondisi seperti ini, maka bentuk *balance of power*¹⁴³ pada tingkat regional yang sebelumnya terbangun oleh hubungan India-Pakistan kemungkinan dapat bergeser menjadi upaya India guna mendukung/memengaruhi bentuk *balance of power* pada tingkat internasional yang terkait dengan sejumlah aktor karena terdapat peran dari pihak luar, terutama AS dan Tiongkok.

¹⁴² Adapun *balance of power* yang terjadi antara India dan AS merupakan bentuk *soft balancing*. Lihat T.V. Paul “Introduction: the Enduring Axioms of Balance of Power Theory and Their Contemporary Relevance” di dalam T.V. Paul, James J. Wirtz, and Michael Fortmann (eds.), *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century* (Stanford: Stanford University Press), 2004, 14.

¹⁴³ Untuk diskusi terkait hal ini lebih jauh, baca misalnya T.V. Paul, James J. Wirtz, and Michael Fortmann (eds.), *Op. Cit.*, “Chapter 11: The South Asian Security Balance in a Western Dominant World” hlm. 305-333, serta “Conclusions: Balance of Power at the Turn of the New Century” hlm. 360-374.

MONOGRAF

KESIMPULAN

B A B

04

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis melalui dokumen serta sejumlah sumber data pendukung mengenai dinamika lingkungan strategis Asia Selatan yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa respons India bagi dinamika lingkungan strategisnya di Asia Selatan adalah berupa penguatan kapabilitas pertahanan dari peningkatan jumlah personel pasukan serta peningkatan jumlah persenjataan bagi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Berbagai bentuk strategi pertahanan dan pengadaan alat-alat pendukung pasukan bersenjata pun telah dilakukan oleh India.

Menurut penulis, kebijakan pertahanan India telah mampu menjaga pertahanan dan keamanan India dari potensi ancaman yang mungkin terjadi. Kebijakan pertahanan India dalam merespons melalui peningkatan kapabilitas pertahanan negaranya lebih kepada sikap yang responsif. Penulis memprediksi bahwa kondisi dilema keamanan dan dinamika persenjataan di kawasan Asia Selatan akan tetap berlangsung dalam beberapa tahun ke depan, sehingga bentuk perimbangan kekuatan pada tingkat regional yang tergambar dari hubungan antara India dan negara-negara di Asia Selatan, khususnya Pakistan, dapat bergeser menjadi bentuk perimbangan kekuatan pada tingkat internasional.

India selayaknya mengelola kebijakan pertahanan, terutama dalam merespons dinamika lingkungan strategisnya untuk tidak terlalu agresif, agar tidak dipersepsikan sebagai ancaman sehingga spiral aksi-reaksi di tingkat kawasan tidak terlalu intens. Dengan demikian, perlombaan senjata dapat dihindari.

Karena monograf ini hanya berfokus pada dinamika lingkungan strategis India di Asia Selatan, serta kebijakan pertahanan India dalam merespons hal tersebut, maka diperlukan telaah lainnya dari perspektif berbeda yang mampu menjelaskan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi India dalam bertindak melalui kebijakan pertahanannya.

DAFTAR

PUSTAKA

Buku:

- Atkinson, Paul, Delamont, Sara. 2011. *SAGE Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publications Ltd.
- Buzan, Barry. 1987. *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*. London: MacMillan Press.
- Cohen, Stephen P, Dasgupta, Sunil. 2010. *Arming without Aiming*. Washington: Brooking Institution Press.
- Dalton, Toby, Tandler, Jaclyn. 2012. *Understanding the Arms Race in South Asia*. Washington: Carnegie.
- Darraj, Susan Muaddi. 2011. *The Indian Independence Act of 1947*. New York: the Chelsea House.
- Gopal, Priyamvada. 2005. *Literary Radicalism in India*. New York: Routledge.
- Howard, Michael. 1997. *The Strategic Environment*.
- Heywood, Andrew. 2011. *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jacques, Kathryn. 2000. *Bangladesh, India and Pakistan: International Relations and Regional Tensions in South Asia*. Australia: Palgrave Macmillan.
- Klotz, Audie, Prakash, Deepa. 2008. *Qualitative Methods in International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lyon, Peter. 2008. *Conflict between India and Pakistan: an Encyclopedia*. California: ABC-CLIO.
- Maddison, Angus. 1971. *Class Structure and Economic Growth: India and Pakistan since the Moghuls*. New York: Routledge.
- Malik, Hafeez. 1993. *Dilemmas of National Security and Cooperation in India and Pakistan*. London: St. Martin's Press.
- Mas'oe'd, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi Edisi ke-2*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Miles, MB, Huberman, AM, Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook* 3rd Edition. Los Angeles: Sage Publication.
- Morgenthau, HJ. 1948. *Politics among Nations*. Canada: The Ryerson.
- Neascu, M. 2009. *Theory of International Relation: Disenchantment and Re-Enchantment*. London: Palgrave Macmillan.
- Paul, T.V., Wirtz J. J., and Fortmann, M. (eds.). 2004. *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford: Stanford University Press.

- Scalapino, Robert. 1975. *Asia and the Road Ahead: Issues for the Major Powers*. Berkeley: University of California Press.
- Tang, Shingping. 2010. *A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Tracy, S.J. 2013. *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Viotti, PR, Kauppi, MV. 2012. *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Yin, Robert K. 2016. *Qualitative Research from Start to Finish 2nd Edition*. New York: the Guilford Press.

Laporan:

- Country of Origin Information Report: Pakistan Security Situation. European Asylum Support Office (EASO). 2017.
- General Assembly Security Council. Special report on the strategic review of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan 2017.
- International Monetary Fund (IMF). *World Economic Outlook: Legacies, Clouds, and Uncertainties*. 2014.
- , *World Economic Outlook: Subdued Demand Symptoms and Remedies*. 2016.
- , *World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth*. 2018.
- Joint Doctrine for the Indian Armed Forces (JDIAF) 2017. New Delhi.
- Keynote Address of Prime Minister of India in 17th Asia Security Summit, the IISS Shangri-La Dialogue 2018. Singapura.
- Minister of Defence of India's speech in 15th Asia Security Summit, the IISS Shangri-La Dialogue 2016. Singapura.
- Minister of State for Defence of India's speech in 14th Asia Security Summit, the IISS Shangri-La Dialogue 2015.
- Ministry of Defence Government of India. *Annual Report 2014-2015*. New Delhi.
- , *Annual Report 2016-2017*. New Delhi.
- , *Press Information Bureau. Military Ties with Foreign Countries 2014-2017*. New Delhi.
- Ministry of Finance, Department of Economics Affairs. *Economic Survey 2017-2018*. New Delhi.
- Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India, *Energy Statistics 2018* (Twenty Fifth Issue). New Delhi.
- The International Institute for Strategic Studies (IISS), *The Military Balance 2014: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics*. London.

- , *The Military Balance 2015: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics*. London.
- , *The Military Balance 2016: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics*. London.
- , *The Military Balance 2017: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics*. London.
- , *The Military Balance 2018: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics*. London.
- The International Institute for Strategic Studies (IISS) *Strategic Survey: the Annual Assessment of Geopolitics 2017*. London.
- The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), *Year Book 2015: Armaments Disarmaments and International Security*. Stockholm.
- , *Year Book 2016: Armaments Disarmaments and International Security*. Stockholm.
- , *Year Book 2018: Armaments Disarmaments and International Security*. Stockholm.
- The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), *Fact Sheet 2016: Trends in World Nuclear Forces 2016*. Stockholm.
- , *Fact Sheet 2017: Trends in World Nuclear Forces 2017*. Stockholm.
- The National Institute for Defense Studies (NIDS), *East Asian Strategic Review 2015: the National Institute for Strategic Studies*. Tokyo.
- , *East Asian Strategic Review 2017: the National Institute for Strategic Studies*. Tokyo.

Journal:

- Abbasí, A.I. 2017. *Indian Cold Start Doctrine and an Indo-Pak Path to Peace*. Strategy Research Project International Fellow (SRPIF).
- Adams, K.R. 2003. *Attack and Conquer? International Anarchy and the Offense-Defense-Deterrence Balance*. *International Security*. Vol. 28 No. 3.
- Andrio, D. 2016. *India's Role in the Emergence of Bangladesh as an Independent State*. *Vestik RUDN International Relation*. Vol. 16 No. 2.
- Campose, P. 2016. *India's National Security Strategy: Imperative of Integrating Defence Policy*. *CLAWS Journal*.
- Chowdhury, S. 2016. *Factors Affecting India-Pakistan Conflict and the Path Ahead*. *Foreign Policy Research Centre Journal*. Vol. 4. 97.
- Frank, L. 2016. *the Czech Republic Security Environment*. *Research Gate*.

- Hipel, KW, Yoshimi, M. 2016. Third Party Intervention in Conflict Resolution: Dispute between Bangladesh and India over Control of the Ganges River. Japan: Springer Japan.
- Horimoto, T. 2015. India's Wars: the Indo-Pakistani Wars and the India-China Border Conflict. International Forum on War History.
- Kapur, A. 1999. India's Geo-strategic Environment. India International Center. Vol. 25 No. 4.
- Keling, MF, Shuib, Md S, Ajis, MN. 2009. The Emergence of India as New Military Power: Threat or Opportunity to Southeast Asia?. Asian Social Science. Vol. 5 No. 4.
- Khattak, Masood UR. 2011. Indian Military's Cold Start Doctrine: Capabilities, Limitations, and Possible Response from Pakistan. South Asian Strategic Stability Institute (SASSI). Research Paper No. 32.
- Malik, AH, Sheikh, NA. 2016. Changing Dynamics of Indo-Bhutan Relations: Implication for India. International Journal of Political Science and Development. Vol. 4 No. 2.
- Mitra, SK. 2003. The Reluctant Hegemon: India's self-perception and the South Asian Strategic Environment. Carfax Publishing.
- Rana, PS J. B. 1971. India and Nepal: the Political Economy of a Relationship. University of California Press. Vol. 11 No. 7.
- Sundararaman, S. 2004. Politics and Security in South-East Asia: Prospects for India-ASEAN Cooperation. Sage Publications.
- Torjman, S. 2005. What is Policy?. The Caledon Institute of Social Policy. Canada.

Sumber (online):

- Data mengenai perkembangan senjata nuklir Pakistan diakses melalui situs the Diplomat.com (<https://thediplomat.com/2015/10/pakistan-clarifies-conditions-for-tactical-nuclear-weapon-use-against-india/>) & (<https://thediplomat.com/2017/07/pakistan-tests-its-nasr-short-range-ballistic-missile-system-improving-range/>)
- Data anggaran R&D diolah dengan India Units Conversion: Units of India Calculator melalui (<http://convert.szygy.in/>)
- Ministry of Defense Islamic Republic of Afghanistan. Press Release 2018 yang diakses melalui situs (<http://mod.gov.af/en/blog>)
- National Portal of India Profil. Diakses melalui situs (<https://www.india.gov.in/india-glance/profile>)
- The Economic Times. Diakses melalui (<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/indias-rd-spend-stagnant-for-20-years-at-0-7-of-gdp/articleshow/62697271.cms>)

The International Institute for Strategic Studies. Diakses melalui (<https://www.iiss.org/about-us>). The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Military Expenditure Data (% of GDP & constant US\$ 2016) 2018. Diakses melalui situs SIPRI (<https://www.sipri.org/databases/milex>)

The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Year Book 2015 & 2016. Diakses situs SIPRI (<https://www.sipriyearbook.org/view>)

The World Bank. Land Area (sq. km). Diakses melalui situs (<https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?end=2017&locations=IN&start=2010>)

The World Bank. GDP (constant 2010 US\$). Diakses melalui situs (<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD>)

The World Bank Data for India's GDP in constant 2010 US\$. Diakses melalui (<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=IN>)

World Energy Council (WEC). Data Batubara, Minyak Bumi, dan Gas Alam India diakses melalui (<https://www.worldenergy.org/data/resources/country/india/coal/>), (<https://www.worldenergy.org/data/resources/country/india/oil/>), & (<https://www.worldenergy.org/data/resources/country/india/gas/>).

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Press Information Bureau

Government of India

Ministry of Defence

08-August-2017 14:59 IST

Military Ties with Foreign Countries

India has signed agreements / Memoranda of Understanding (MOUs) on defence cooperation with several countries, which cover a range of activities including training, exchange of personnel and financial aspects of cooperation. A list of such agreements / MOUs signed over the past three years is as under:-

LIST OF MILITARY OR DEFENCE AGREEMENT SIGNED WITH FOREIGN COUNTRIES FOR LAST THREE YEARS (FROM 1ST AUGUST 2014)

Sl.No.	Name of Country	Title	Date of Signing
1	Bangladesh	MoU between the Coast Guards for establishment of Collaborative Relationship to Combat Transnational Illegal activities at sea and Develop Regional Cooperation	06.06.2015
		MoU on Defence Cooperation Framework	08.04.2017
2	Botswana	MoU on secondment of Indian Armed Forces Personnel to the Botswana Defence Forces	15.09.2014

Sl.No.	Name of Country	Title	Date of Signing
3	France	Inter-Governmental Agreement for procurement of 36 Rafale aircrafts.	23.09.2016
4	Fiji	MoU on Bilateral Defence Cooperation	29.05.2017
5	Japan	MoU on Defence Cooperation and Exchange	01.09.2014
		Agreement concerning the Transfer of Defence Equipment and Technology.	12.12.2015
		Agreement concerning security measures for protection of classified military information	12.12.2015
6	Kazakhstan	MoU on Defence and Military Technical Cooperation	08.07.2015
7	Kenya	MoU on Cooperation in the field of Defence Cooperation	11.07.2016
8	Kyrgyzstan	Defence Cooperation Agreement	12.07.2015
9	Oman	MoU on Military Cooperation	22.05.2016
		MoU to cooperate on Maritime Issues	22.05.2016
		Protocol between the Air Forces on Flight Safety Information Exchange	22.05.2016
		MoU between the Coast Guards in the field of Marine Crime Prevention at Sea	22.05.2016
10	Portugal	MoU on Defence Cooperation	07.01.2017
11	Republic of Korea	MoU between the Defence Acquisition Program	21.04.2017

Sl.No.	Name of Country	Title	Date of Signing
		Administration of RoK and the Ministry of Defence, India to develop and strengthen defence industry cooperation and to establish Special Strategic Partnership including close cooperation in Naval Ship Building.	
12	Russia	Agreement on Training of Indian Armed Forces personnel in the Russian Military Training Establishment	11.12.2014
		Agreement between the MoD of India and the MoD of Russia on Cooperation in Aircraft Flight Safety	21.01.2015
		Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the field of Helicopter Engineering.	24.12.2015
		Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation on Supply of S-400 Triumph Air Defence Missile Systems to the Republic of India.	15.10.2016
		Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Russian Federation for	15.10.2016

Sl.No.	Name of Country	Title	Date of Signing
		construction of follow-on ships of Project 11356 in Russia and in India.	
13	Seychelles	MoU for Cooperation in the field of Hydrography	11.03.2015
14	Singapore	Defence Cooperation Agreement	23.11.2015
15	Spain	MoU on sharing classified information	04.03.2015
16	Sudan	MoU on Defence Cooperation and Exchanges	13.03.2015
17	Tanzania	MoU on Cooperation in the field of Hydrography	19.06.2015
18	Turkmenistan	Agreement on Cooperation in the field of Defence	11.07.2015
19	United Arab Emirates	MoU concerning Mutual Protection of Classified Information	23.05.2016
		Memorandum of Understanding on Cooperation in the field of Defence Industry.	25.01.2017
20	USA	New Framework for the India-US Defence Relationship	03.06.2015
		Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA)	29.08.2016
21	Vietnam	MoU between Coast Guards for establishment of collaborative relationship to combat transnational crime and develop mutual cooperation	25.05.2015

Sl.No.	Name of Country	Title	Date of Signing
		Programme of Cooperation between the Vietnam People's Air Force & Air Defence and Indian Air Force	05.12.2016

The issue pertains to internal budgetary deliberations of the United States, on which we have no comments to offer.

India has defence partnerships with several countries including France, Israel, Russia and United States, as well as countries in our immediate and extended neighbourhood.

This information was given by Minister of State for Defence Dr. Subhash Bhamre in a written reply to Dr. Sanjay Singh in Rajya Sabha today.

Nampi/Rajib/Ranjan

TENTANG PENULIS

Tentang Penulis



Nova Bela Dhyta, S.Hub.Int., M.H., lahir pada 16 Januari 1997 di Tanjung Karang, Lampung. Ia memperoleh pendidikan sarjana (cumlaude) dari Jurusan Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Lampung (2015–2019) dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Jambi. Sebelum mengabdikan diri sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi (FH-Unja) sejak medio 2024, ia bekerja sebagai staf Humas pada Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi.

Pendidikan formal pertama yang telah ditempuhnya ialah Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Islam, Liwa, Lampung Barat, dari tahun 2001 hingga 2002. Setelah lulus TK pada 2002, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3, Perumnas Way Halim, Bandar Lampung; dan lulus pada 2008. Kemudian, ia menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 29, Bandar Lampung, sejak tahun 2008 hingga lulus pada 2011. Usai menamatkan pendidikan di SMP, ia mengikuti orang tua karena pindah tugas ke kota Jambi dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 4 Kota Jambi, tahun 2014. Saat menjadi siswa kelas dua pada SMAN 4 Kota Jambi, ia berkesempatan mengikuti Student Exchange Program to New Zealand dari Oktober hingga November 2012 di Palmerston North yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Selama menjadi mahasiswa S-1, ia aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa berbasis Bahasa Inggris pada FISIP Unila, yaitu Social Political English Club (SPEC) dan dipercaya menjadi Ketua Umum. Selain itu, ia terlibat pula dalam penyelenggaraan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia XXX (PSNMHII ke-30) di Unila pada tahun 2018.



Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. adalah seorang akademisi/dosen (lektor) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, dengan kepakaran pada bidang Kejahatan Lintas-Negara, dan Kejahatan Internasional (tindak kejahatan terhadap kemanusiaan), Kejahatan Politik, dan *White-Collar Crime* (kejahatan oleh kelas atas atau yang berstatus sosial-ekonomi tinggi yang terkait dengan pekerjaannya).

Pada medio 2013 hingga awal 2015, Sulisty merupakan staf pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Ekasakti (Unes), Padang. Selama periode Agustus 2014–Juni 2015, Sulisty mengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pada tahun 2009, dibawah supervisi Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A., Yogo Tri Hendiarto, S.Sos., M.Si., dan Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H, LL.M., Iwan Sulisty memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Kriminologi dari Universitas Indonesia (UI). Ia menulis skripsi dengan judul Dampak dari Keberadaan, Wewenang, dan Kinerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap Persepsi Risiko Penghukuman Bila Melakukan Tindakan Suap-Menyuap di Kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Direktorat Jenderal X, Departemen Y. Saat kuliah pada Program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi FISIP-UI, Sulisty memfokuskan perhatian pada pembahasan tentang Transnational Organized Crimes, Kejahatan Perang, Kejahatan Politik, serta White-Collar Crimes (Korupsi). Pada tahun 2012, Iwan Sulisty mendapatkan gelar *Master of Arts* (M.A.) dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM) di bawah bimbingan Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, Dr. Dafri Agussalim, Prof. Dr. H. Yahya Muhaimin, dan Drs. Muhadi Sugiono, M.A. setelah mempertahankan tesis dengan judul Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara.

Iwan Sulisty memfokuskan studi pada isu-isu terkait *Global-Local Security*, *White-Collar Crime*, Kejahatan Lintas-Negara, dan Kejahatan Internasional (kejahatan kemanusiaan), yang antara lain dipublikasi pada jurnal nasional dengan judul “Kejahatan Terorganisasi Lintas-Negara di Eropa Pasca-Brexit, 2016–2022“. Ia juga menulis pada *proceeding* internasional dengan judul “A Review Towards Theories, Concepts, Methods in International Relations, and Related International Legal Instruments for Conducting Research on Transnational Organized Crime “, “Political Corruption and


White-Collar Crime Related to Covid-19 Countermeasures“, dan *“A Review Towards Global Crime Governance in Overcoming Trafficking in Cultural Property”*.

Saat kuliah di UI, Sulistyo terlibat sebagai anggota Divisi Kajian Internal Kampus pada Departemen Keilmuan Senat Mahasiswa FISIP-UI 2006-2007. Ia juga pernah menjadi reporter atau pers kampus pada Badan Otonom Suara Mahasiswa (BO Suma) UI dari tahun 2007 hingga 2008 dan sempat menjadi Pimpinan Redaksi tabloid *“Warta Pemira”*. Sejak Juli–September 2009, ia pernah menjadi asisten-teknis dalam suatu penelitian tentang *people smuggling* (penyeludupan orang) yang dipimpin oleh Prof. Drs. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.; project tersebut merupakan kerja sama antara Departemen Kriminologi FISIP-UI, International Organization for Migration (IOM), dan the Australian Federal Police (AFP).

Sebagai ilmuwan, Sulistyo pun aktif di dalam sejumlah diskusi terkait isu keamanan, antara lain pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan di Bandar Lampung oleh Puslitbang Strahan Kementerian Pertahanan RI tentang ancaman nonmiliter. Pada tahun 2019, Sulistyo mempresentasikan makalahnya pada the 9th *World Human Rights Cities Forum* (WHRCF) di Kim Daejung Convention Center, Gwangju, Korea Selatan. Pada tahun 2020, Sulistyo pernah berkegiatan sebagai anggota divisi riset pada Unila SDGs Center. Sulistyo mempresentasikan makalahnya berjudul *“Maritime Security in Southeast Asia”* pada Joint International Summer School 2020 yang digelar secara daring oleh Universitas Lampung dan University of Zagreb, Kroasia, pada 21-25 September 2020.

Selanjutnya, bersama para anggota tim mahasiswanya, Sulistyo secara daring juga menyajikan makalah dengan judul *“Trust Building and the Roles of Local Religious Leaders in Countering Covid-19 Pandemic within Society: Case Study of Bandar Lampung City, Indonesia”* pada the 11th WHRCF 2021 dan makalah dengan judul *“Toward ASEAN Smart City Network: Industrial and Innovative Challenges in the City of Bandarlampung, Indonesia”* pada the 12th WHRCF 2022. Bersama dua penulis lainnya, Sulistyo telah menulis satu bab, *“Pengelolaan Kerja Sama Subnasional di Asia Tenggara”*, di dalam buku berjudul *Paradiplomasi: Pendekatan dan Konteks* (Yogyakarta: Quantum, 2022).

Selama dua tahun berturut-turut, Sulistyo pernah menjadi chairperson pada the 2nd Universitas Lampung *International Conference on Social Sciences* (ULICoSS) 2021 dan the 3rd ULICoSS 2022. Dalam kegiatan internasional, Sulistyo terlibat aktif dalam kerja sama Jurusan HI FISIP Unila dengan Jurusa



Ilmu Politik Universitas Zagreb, Kroasia, sehingga ia diberi kepercayaan untuk mengikuti pertukaran dosen mengajar di Universitas Zagreb dan di Akademi Militer Kroasia Dr. Franjo Tuđman pada 20–29 April 2024 dalam kerangka pendanaan Erasmus+.

Sejak duduk di bangku kuliah di UI, Iwan Sulistyو telah aktif menuliskan puluhan artikel opininya dan telah dimuat di sejumlah surat kabar cetak, baik nasional maupun lokal, yang diterbitkan menjadi sebuah buku “Meneropong Berbagai Isu” (Hexagon, 2024).

KEBIJAKAN PERTAHANAN INDIA

Responsif & Provokatif di Mandala Asia Selatan

Monograf ini menyajikan telaah tentang kebijakan pertahanan India dalam merespons dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Selatan selama periode tahun 2014–2017. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kasus, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang utamanya dipublikasi oleh *the International Institute for Strategic Studies* (IISS) dan *the Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI).

Penulis menggunakan beberapa konsep, yakni *defense policy*, *strategic environment*, *national interest*, *deterrence*, *balance of power*, *security dilemma*, dan *arms dynamic* dengan tiga model yaitu *action-reaction*, *domestic structure*, dan *technological imperative*. Penulis berargumen bahwa seluruh negara, khususnya India, telah meningkatkan kapabilitas pertahanan/militer mereka dari segi kuantitas, seperti menambah jumlah personel dan melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan pada tiap matra (darat, laut, dan udara), termasuk pula pada hulu ledak nuklirnya sebagai wujud *deterrence*. India merupakan negara yang lebih bersifat responsif dan cenderung provokatif. Spiral aksi-reaksi lebih melibatkan India dan Pakistan.

Dari segi jumlah persenjataan konvensional, India adalah yang paling kuat; tetapi, dari aspek kuantitas hulu ledak nuklir, relatif lebih sedikit dibanding kompetitor utamanya, Pakistan. Sikap responsif yang ditunjukkan oleh India didasari oleh persepsi ancaman, dilema keamanan, dan kepentingan nasionalnya, berupa faktor geografis, demografis, dan ekonomis. Kerja sama militer strategis yang dilakukan oleh India dengan berbagai negara, khususnya Amerika Serikat, merupakan reaksi atas hubungan Pakistan dan Tiongkok.



HEXAGON PUBLISHING

☎ 0822-8077-6140

© hexagon_publishing

✉ admin@hexagonpublishingid

🌐 www.hexagonpublishing

ISBN 978-623-10-4103-6



9 786231 041036